

SKRIPSI

**ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DI KABUPATEN
ACEH BARAT**



Disusun Oleh:

**DECKY SYARHAS
NIM. 180604126**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Decky Syarhas
NIM : 180604126
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 08 Maret 2024

Yang menyatakan,



Decky

Decky Syarhas

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Sektor Unggulan di Kabupaten Aceh Barat

Disusun oleh:

Decky Syarhas
NIM. 180604126

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Maimun S.E., Ak. M.Si.
NIP. 197009171997031002

Pembimbing II,



Cut Elfida, M.A.
NIP. 198912122023212076

Mengetahui,
Ketua Prodi Ilmu Ekonomi,

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 1983070920140320002

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Sektor Unggulan di Kabupaten Aceh Barat

Decky Syarhas
NIM: 180604126

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) dalam Bidang Ilmu
Ekonomi

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 08 Maret 2024 M
27 Syaban 1445 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Dr. Maimun S.E., Ak. M.Si.
NIP. 197009171997031002

Sekretaris,

Cut Elfida, M.A.
NIP. 198912122023212076

Penguji I,

Dr. Idaryani, SE., M.Si.
NIDN. 0105057503

Penguji II,

Hafizh Saufana, SP., S.Hi, ME
NIDN. 2006019002

AR - RANIRY

Mengetahui

Dekan Fakultas **Ekonomi** dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. Hafas Purqani, M.Ec.
NIP. 198006252009011009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Decky Syarhas
NIM : 180604126
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
E-mail : 180604126@student-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

Analisis Sektor Unggulan di Kabupaten Aceh Barat

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.


Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

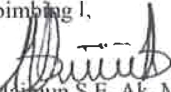
Pada tanggal : 08 Maret 2024

Mengetahui,

Penulis,


Decky Syarhas
NIM. 180604126

Pembimbing I,


Dr. Maimun S.E. Ak. M.Si.
NIP. 197009171997031002

Pembimbing II,


Cut Elfida N.A.
NIP. 198912122023212076

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Sektor Unggulan di Kabupaten Aceh Barat**” skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan untuk gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Cut Dian Fitri, S.E., M.Si. selaku Ketua program Studi Ilmu Ekonomi dan Ana Fitria, M.Sc. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi.
3. Hafiizh Maulana, S.P., S.H.I., selaku ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Maimun S.E, Ak.M.Si. selaku pembimbing I dan Cut Elfida, S.HI., MA selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Winny Dian Safitri, M.Si selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan selama kuliah dan staf pengajar FEBI terkhusus jurusan Ilmu

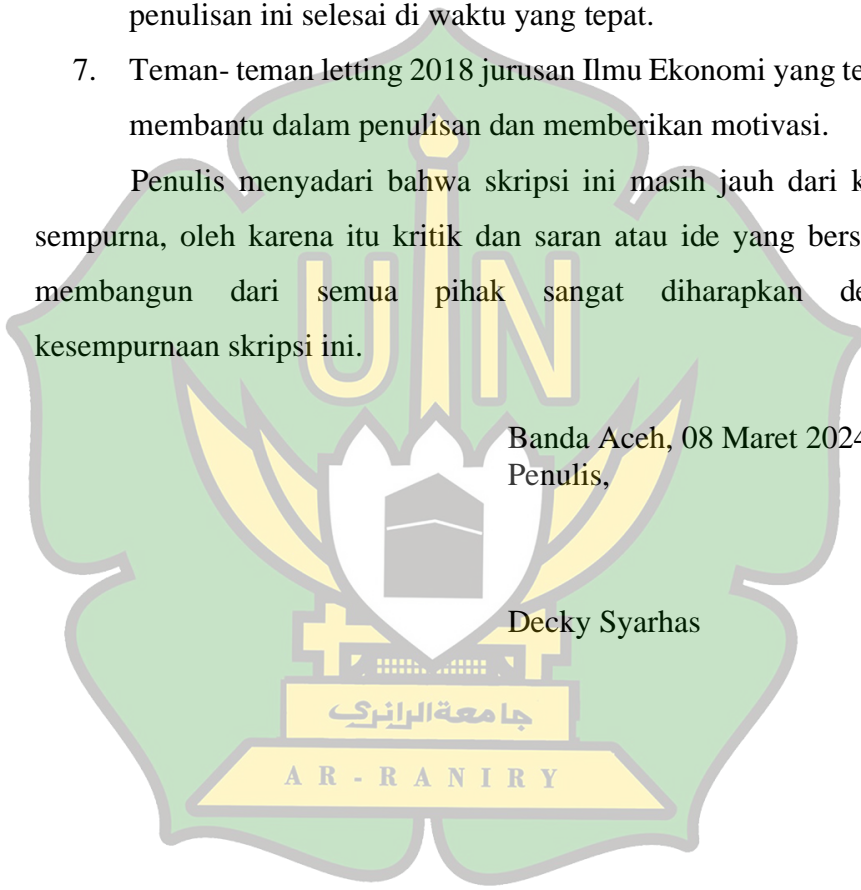
Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

6. Kedua Orang tua yang sudah membantu dalam menyemangati dan memberikan motivasi serta doa, sehingga penulisan ini selesai di waktu yang tepat.
7. Teman-teman leting 2018 jurusan Ilmu Ekonomi yang telah membantu dalam penulisan dan memberikan motivasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran atau ide yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 08 Maret 2024
Penulis,

Decky Syarhas



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATANNYA
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z̤
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z̤	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	ص	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	س	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Arab	Latin
1	◌َ	<i>Fathah</i>
2	◌ِ	<i>Kasrah</i>
3	◌ِ	<i>Dammah</i>

Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa : كيف

Haul : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِ ي / ٲ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ِ ي	<i>Dammah dan Waw</i>	Ū

Contoh:

qāla : قال

ramā : رمى

qāla : قال

yaqūlu : يقولون

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl: روضة لاطفال

Al-Madinatul Munawwarah Al-Madinah Al-Munawwarah/: قروملا

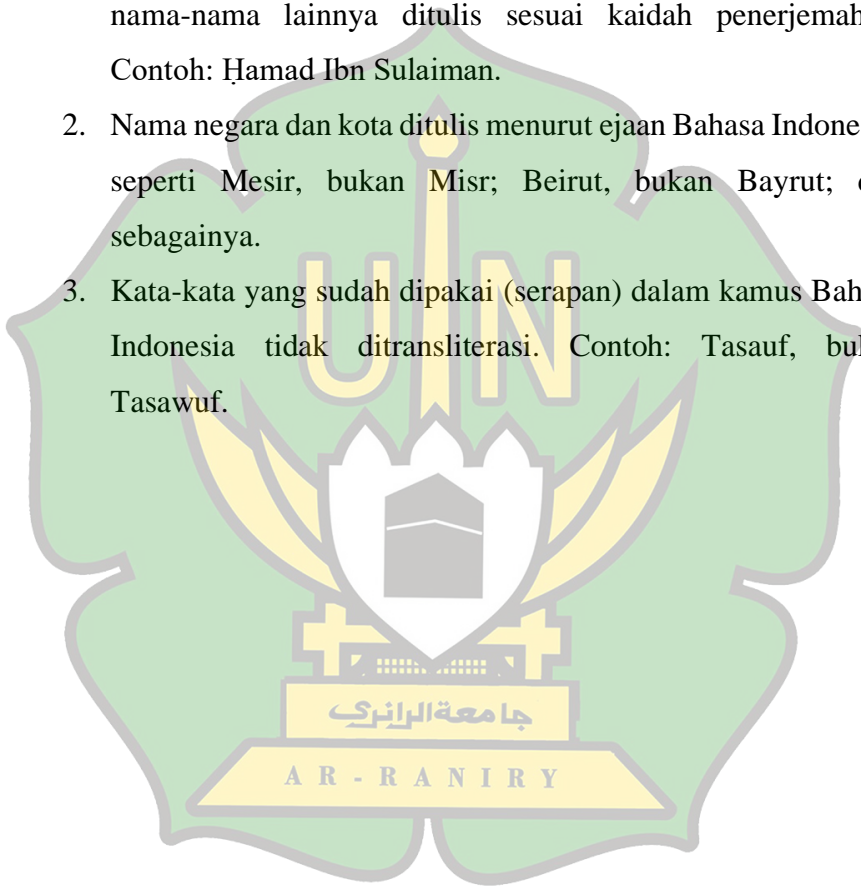
قنيدملا

Talḥah: تحلط

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Decky Syarhas
Nim : 180604126
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ilmu Ekonomi
Judul : Analisis Sektor Unggulan Di Kabupaten Aceh Barat
Pembimbing I : Dr. Maimun, S.E, Ak. M.Si
Pembimbing II : Cut Elfida, MA

Pertumbuhan ekonomi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah dan dalam jangka panjang akan membawa serangkaian perubahan mendasar dalam struktur ekonomi suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan sektor basis dan non basis di perekonomian Kabupaten Aceh Barat berdasarkan pendekatan *Location Quotient* dan untuk melihat perubahan dan pergeseran sektor perekonomian di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan pendekatan *Shift Share* di Kabupaten Aceh Barat. Data penelitian menggunakan PDRB dari Kabupaten Aceh Barat dan Provinsi Aceh yang diambil data mentah selama lima tahun dari 2018- 2022 yang diperoleh dari BPS Kabupaten Aceh Barat dan BPS Banda Aceh. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share* (SS). Hasil dari penelitian pada uji analisis *Location Quotient* yang termasuk sektor basis meliputi sektor pertambangan dan penggalian, kontruksi, dan jasa keuangan dan asuransi pada Kabupaten Aceh Barat, sedangkan uji analisis *Shift Share* berdasarkan hasil analisis *Shift Share* bernilai positif, menunjukkan bahwa sektor-sektor yang ada di Kabupaten Aceh Barat secara keseluruhan tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor-sektor yang ada di Provinsi Aceh.

Kata Kunci: *Location Quotient*, *Shift Share*, Sektor Unggulan

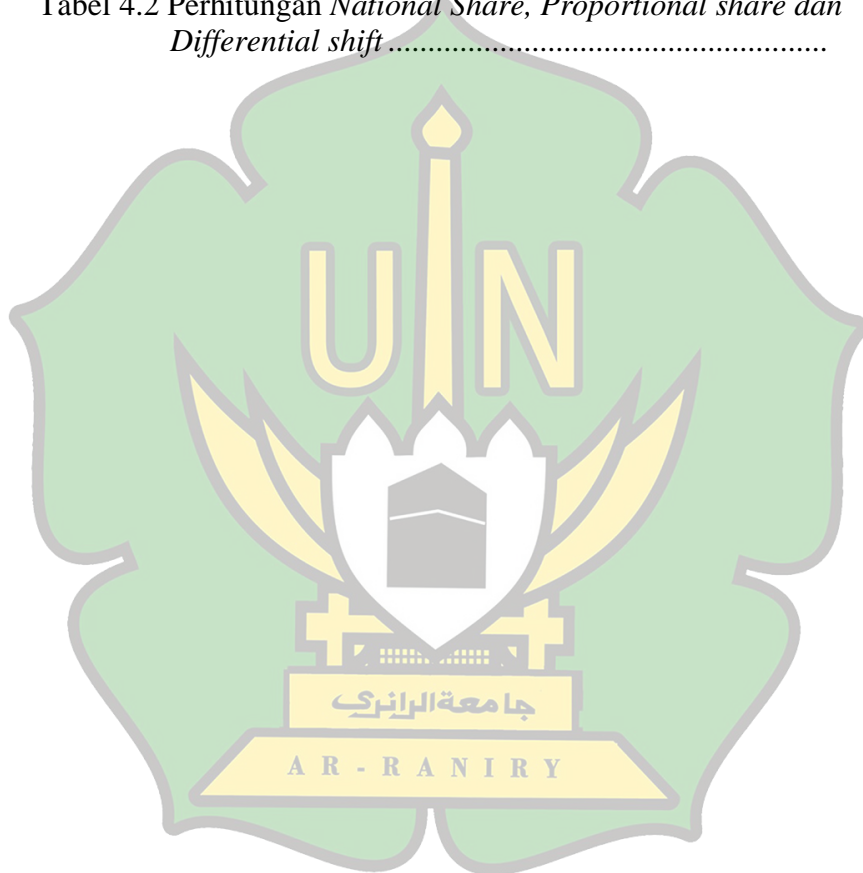
DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATANNYA	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
2.1 Pembangunan Ekonomi Daerah	13
2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	16
2.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik.....	21
2.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik	22
2.2.3 Teori <i>Schumpeter</i>	22
2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	23
2.4 Teori Basis Ekonomi	25
2.5 Indikator dan Tolak Ukur Pertumbuhan Ekonomi	27
2.6 Struktur Ekonomi dan Perubahan Struktur Ekonomi	33
2.6.1. Peran Pemerintah dalam Pembangunan	
Ekonomi Daerah.....	35
2.7 Sektor Unggulan	36
2.8 Penelitian Terkait.....	39
2.9 Kerangka Pemikiran	42
2.10 Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Aceh Barat.	44
2.10.1 Sektor Unggulan.....	44

2.10.2	Pertumbuhan Ekonomi.....	44
2.10.3	Sektor Unggulan Kabupaten Aceh Barat	45
BAB III METODE PENELITIAN.....		46
3.1	Rancangan Penelitian.....	46
3.2	Sampel Penelitian	46
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	46
3.4	Definisi Operasional Variabel	47
3.4.1.	PDRB atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha	47
3.4.2.	Pertumbuhan Ekonomi	47
3.4.3.	Sektor-Sektor Ekonomi	48
3.4.4.	Sektor Unggulan.....	49
3.5	Teknik Analisis Data	51
3.5.1.	Analisis <i>Loqation Quotient</i> (LQ)	52
3.5.2.	Analisis <i>Shift Share</i>	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		59
4.1.	Gambar Umum Lokasi Penelitian	59
4.2.	Hasil Analisis Data	63
4.2.1.	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ)	63
4.2.2.	Hasil Analisis <i>Shift Share</i>	72
5.1	Kesimpulan	80
5.2	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA		83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Barat ...	4
Tabel 2.1 Penelitian Terkait dengan Skripsi	40
Tabel 4.1 Hasil Perhitungan <i>LQ</i> dengan Sektor Basis dan Non Basis Tahun 2018-2022	65
Tabel 4.2 Perhitungan <i>National Share</i> , <i>Proportional share</i> dan <i>Differential shift</i>	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Analisis Sektor Perekonomian dan Sektor Unggulan Kabupaten Aceh Barat	43
Gambar 2.2 Peta Kabupaten Aceh Barat	43
Gambar 4.2 Grafik Persentase laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data PDRB Kabupaten Aceh Barat Atas Dasar Harga Berlaku	
Lampiran 1. Data PDRB Kabupaten Aceh Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2018-2022	89
Lampiran 2. Data PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2018-2022	90
Lampiran 3 Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> Tahun 2018 ..	91
Lampiran 4 Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> Tahun 2019...	92
Lampiran 5 Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> Tahun 2020...	93
Lampiran 6 Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> Tahun 2021...	94
Lampiran 7 Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> Tahun 2022...	95
Lampiran 8 Perhitungan <i>National Share, Proportional share dan Differential shift</i>	96



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang memiliki niat dan itikad yang kuat dalam belajar untuk menuju menjadi negara maju. Hal ini terlihat bahwa negara Indonesia masih dalam termasuk keadaam negara yang masih banyak ketertinggalan dari negara lain. Oleh sebab itu negara Indonesia perubahan dengan cara melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan ini berguna untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berbagai upaya sudah dilakukan Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan ekonomi dan pemerataan ekonomi yang adil, dengan cara menurunkan jumlah penduduk miskin. Akan tetapi masih terdapat diskrepansi antara harapan dan kenyataan di lapangan berupa kemiskinan (Masruah, 2013).

Suatu negara selalu menginginkan perekonomian yang maju dalam usaha meningkatkan taraf pendapatan masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan. Maka pembangunan ekonomi sangat penting dilakukan dalam mencapai sasaran tersebut. Pembangunan ekonomi memiliki sasaran dalam meningkatkan kecerdasan, taraf hidup hingga kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi daerah dapat melibatkan multisektor serta para pelaku pembangunan, sehingga diperlukan jaring kerjasama dan koordinasi di antara semua pihak yang berkepentingan. Sejak

era reformasi terjadi pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi ataupun disebut otonomi daerah yang mengandung makna, beralihnya sebagian besar proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah (Nurlina *et al.*, 2019).

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi adanya perubahan peranan dari beberapa sektor produksi dan penciptaan lapangan kerja serta perubahan pemerataan pendapatan. Selain itu, permasalahan utama pembangunan ekonomi adalah permasalahan alokasi sumber daya ekonomi yang tersedia untuk menciptakan nilai tambah secara optimal (Pratiwi dan Indrajaya, 2019). Dengan demikian, perubahan struktur ekonomi merupakan satu bagian proses pembangunan ekonomi. Namun perlu dipahami bahwa perubahan struktur ekonomi itu sendiri dapat saja berpengaruh secara negatif terhadap hasil pembangunan, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, ketimpangan pembangunan antar sektor dan tingginya tingkat ketergantungan ekonomi. Oleh karena itu, perubahan struktur ekonomi perlu dicermati dan diarahkan agar efek negatif tersebut dapat dihindari (Hermanto, 2017).

Indikasi perubahan struktur ekonomi dapat dilihat dengan pergeseran peranan atau perubahan sektor primer (pertanian dan pertambangan) terhadap produk domestik bruto yang semakin

berkurang diikuti dengan pergeseran peminatan sektor sekunder (industri, listrik gas air, dan konstruksi) dan sektor tersier (perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan komunikasi, keuangan dan jasa) yang cenderung meningkat (Hakim *et al.*, 2017). Dengan kata lain, pembangunan ekonomi dalam jangka panjang akan membawa serangkaian perubahan mendasar dalam struktur ekonomi suatu negara atau disebut perubahan struktur ekonomi, yang semula lebih bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor primer menuju struktur perekonomian yang lebih modern yang didominasi oleh sektor sekunder dan tersier (Hakim *et al.*, 2017).

Pertumbuhan ekonomi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Jumlah penduduk terus bertambah dan berarti kebutuhan ekonomi juga bertambah, sehingga dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Pendapatan tambahan tersebut dapat diperoleh dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahun (Nurlina *et al.*, 2019). Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari industri unggulan di wilayah tersebut. Analisis data (PDRB) suatu wilayah dari satu tahun ke tahun berikutnya untuk menemukan skor unggulan wilayah tersebut. Suatu daerah harus memberikan peran penuh terhadap sektor unggulan, sehingga daerah menjadi pemicu pembangunan ekonomi daerah. Dengan diidentifikasinya sektor ekonomi tersebut dapat dikembangkan dan menjadi acuan untuk meningkatkan

perekonomian dan pembangunan di wilayah tersebut (BPS Aceh, 2023).

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Barat atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2018-2022

Sektor Ekonomi	Tahun/Persentase				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	4,62	3,10	4,06	-2,12	5,69
Pertambangan dan penggalan	40,84	9,37	9,20	19,84	-2,94
Industri pengolahan	4,15	1,88	-4,09	6,04	7,40
Pengadaan listrik dan gas	3,16	5,13	3,48	1,04	2,05
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	6,76	17,49	4,38	-2,47	-0,15
Konstruksi	5,37	4,43	4,41	1,18	-0,46
Perdagangan besar dan eceran	6,28	3,32	-2,13	4,29	7,72
Transportasi dan pergudangan	3,89	4,56	-24,13	10,21	7,79
Penyediaan akomodasi dan makan minum	9,80	8,32	-8,28	1,43	29,27
Informasi dan komunikasi	0,61	3,22	10,71	7,28	12,83
Jasa keuangan dan asuransi	0,08	9,02	0,58	-4,56	-3,52
<i>Real estate</i>	3,75	4,80	-0,13	4,24	4,78
Jasa perusahaan	5,55	5,69	-4,63	0,39	10,92
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	4,33	3,21	-3,53	5,38	-0,21
Jasa pendidikan	5,41	7,85	2,32	2,57	4,82
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	5,95	6,74	4,23	9,68	10,83
Jasa lainnya	5,16	7,92	1,09	2,70	11,55
PDRB	10,14	4,99	1,88	5,84	3,32

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Aceh Barat 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2018 hingga 2022, dapat dilihat bahwa terdapat variasi yang signifikan dalam performa sektor-sektor ekonomi. Salah satu sektor yang menarik adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menunjukkan fluktuasi yang cukup besar, dengan pertumbuhan negatif pada tahun 2021 dan pemulihan yang kuat pada tahun 2022. Ini menunjukkan potensi dasar sektor ini sebagai titik temu atau sektor basis yang penting bagi ekonomi Kabupaten Aceh Barat. Sementara itu, sektor-sektor lain seperti jasa kesehatan, informasi dan komunikasi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan bahkan meningkat, menandakan potensi mereka sebagai sektor unggulan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan sektor-sektor dengan pertumbuhan positif dan potensi daya saing ini. Penggunaan metode analisis seperti Koefisien Lokasi (Location Quotient) dan Shift Share dapat membantu dalam menentukan sektor-sektor ekonomi unggulan yang dapat dijadikan prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan.

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, terlihat jelas sektor pertanian, perikanan dan kehutanan pada tahun 2021 laju pertumbuhannya paling rendah dan mengalami kontraksi pertumbuhan negatif sebesar 2,12 % dan meningkat di tahun 2022 sebesar 5,69 %. Pada dasarnya, jika pemerintah kabupaten Aceh Barat memahami dengan benar

potensi ekonomi apa yang dimiliki daerahnya dan dapat dikelola dengan baik, maka bukan tidak mungkin PDRB Kabupaten Aceh Barat dapat meningkat dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat dapat melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Setiap tahun terjadi pertumbuhan ekonomi, namun belum diketahui sektor apa saja yang menjadi sektor basis sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Dari pertumbuhan ekonomi yang ada belum diketahui sektor ekonomi apa saja yang memiliki potensi daya saing kompetitif dan komparatif, sehingga pertumbuhan yang ada hanya sebatas pada angka-angka kuantitatif saja. Oleh karena itu, Kabupaten Aceh Barat memerlukan perhatian khusus untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya. Ada beberapa jenis metode analisis untuk menentukan sektor-sektor ekonomi unggulan dengan pendekatan matematis dapat digunakan di suatu wilayah, di antaranya adalah Koefisien Lokasi (*Location Quotient* atau *LQ*), *Typologi Klassen* dan analisis *Shift Share*. Penelitian ini menggunakan metode analisis *Location Quotient* dan *Shift Share* karena dengan dua alat analisis ini, akan semakin cepat menemukan potensi sektor unggulan di daerah yang ingin dikaji (Nur, 2021).

Analisis *Location Quotient* dan *Shift Share* bukanlah alat analisis baru, penelitian yang dilakukan oleh Nur (2021) untuk mengetahui sektor unggulan dan tidak unggul melalui data PDRB Kabupaten Bulungan, dengan menggunakan alat analisis *Shift Share*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni penelitian ini menggunakan dua alat analisis yaitu analisis *Shift*

Share dan *Location Quotient*. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya mengenai analisis sektor unggulan di beberapa wilayah Indonesia.

Dalam penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Alfinda (2023) yang mengkaji tentang sektor unggulan yang ada di Provinsi Aceh, serta menganalisis keterkaitan spasial ekonomi antar wilayah di kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima sektor ekonomi utama yang menjadi penyumbang sekaligus unggulan terbesar, antara lain adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, informasi dan komunikasi; pertambangan dan penggalian, perdagangan besar maupun eceran, serta konstruksi. Di sisi lain, penelitian serupa juga dilakukan oleh Ringo & Agustiar (2017) yang mengidentifikasi komoditi unggulan khususnya di sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Aceh Barat. Dalam subsektor pertanian, durian adalah prioritas utama, tersebar di dua kecamatan, diikuti langsung, jeruk manis, jambu biji, dan pisang di tiga kecamatan masing-masing, jambu air di empat kecamatan, dan nangka di tiga kecamatan. Karet menjadi prioritas utama di subsektor perkebunan, tersebar di tiga kecamatan. Di subsektor peternakan, ayam ras, sapi, dan kerbau tersebar di tiga kecamatan masing-masing. Di subsektor perikanan, ikan nila menjadi prioritas utama di dua kecamatan, sedangkan ikan lele di satu kecamatan. Akan tetapi, dalam kedua penelitian tersebut tidak memberikan analisis sektoral secara umum tetapi tidak mengaplikasikan metode yang terperinci seperti *Shift Share* dan

Location Quotient untuk mengevaluasi sektor unggulan di Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan hasil penelitian Nurlina *et al.*, (2019), menyatakan bahwa hasil analisis *shift share* dijelaskan bahwa sektor yang paling tinggi memberikan peningkatan terhadap PDRB Aceh adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan itu berada di Kabupaten lain di provinsi Aceh, seperti Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan Kota Langsa tidak termasuk. Sektor yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan PDRB Aceh di Kota Langsa adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan lahan pertanian, dan banyaknya lahan-lahan pertanian maupun perkebunan yang dimanfaatkan oleh pihak masyarakat dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dalam penelitian yang akan dikaji oleh Penulis dengan pendekatan *Shift Share* dan *LQ* dapat memberikan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana sektor unggulan di Kabupaten Aceh Barat berkontribusi terhadap ekonomi lokal dibandingkan dengan ekonomi regional secara keseluruhan. Penelitian ini dapat mengisi kesenjangan penelitian dengan mengeksplorasi kontribusi sektor-sektor utama terhadap PDRB lokal serta membandingkannya dengan sektor-sektor unggulan di tingkat provinsi dan kabupaten lain.

Selain itu, peraturan perundang-undangan otonomisasi daerah Nomor 32 Tahun 2004, bahwa yang menjalankan daerah dalam hal ini provinsi dan Kabupaten/Kota harus mampu mengelola

potensi sumber daya daerah yang tumbuh dan berkembang sehingga dapat memberi dorongan kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian perlu adanya perhatian serius untuk memahami sektor apa saja yang terus berkembang dan sektor apa saja yang mengalami kejenuhan. Dengan mengetahui sektor basis dan non basis dapat memiliki pengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Aceh Barat, maka dapat membantu pemerintah dalam mengelola kebijakan dalam hal ekonomi dan pembangunan daerahnya sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perubahan struktur ekonomi dan sektor-sektor unggulan di Kabupaten Aceh Barat guna untuk mengembangkan perekonomian yang ada di daerah tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai potensi pertumbuhan ekonomi dengan judul “**Analisis Sektor Unggulan di Kabupaten Aceh Barat**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian ini dapat di rumuskan adalah:

1. Bagaimanakah perbedaan sektor basis dan non basis di perekonomian Kabupaten Aceh Barat berdasarkan pendekatan *Location Quotient*?

2. Bagaimana perubahan dan pergeseran sektor perekonomian di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan pendekatan *Shift Share*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbedaan sektor mana yang menjadi sektor basis dan non basis perekonomian di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan pendekatan *Location Quotient*.
2. Untuk mengetahui bagaimana perubahan dan pergeseran sektor perekonomian di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan pendekatan *Shift Share*.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor ekonomi dan potensi ekonomi serta mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh agar menjadi rujukan pustaka ekonomi dan perluasan ilmu pengetahuan dan juga dapat berguna untuk masyarakat serta untuk mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan literatur untuk penelitian serupa di waktu mendatang.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis :

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan atau pengetahuan dan pengalaman penelitian tentang sektor unggulan di Kabupaten Aceh Barat.

2. Bagi Umum :

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam merencanakan arah kebijakan pembangunan ekonomi pada semua sektor perekonomian dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta bermanfaat bagi pelaku pasar modal terutama investor.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun susunan sistematika dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan landasan teori, mengenai pengertian pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, keterkaitan antar variabel independen terhadap variabel dependen, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

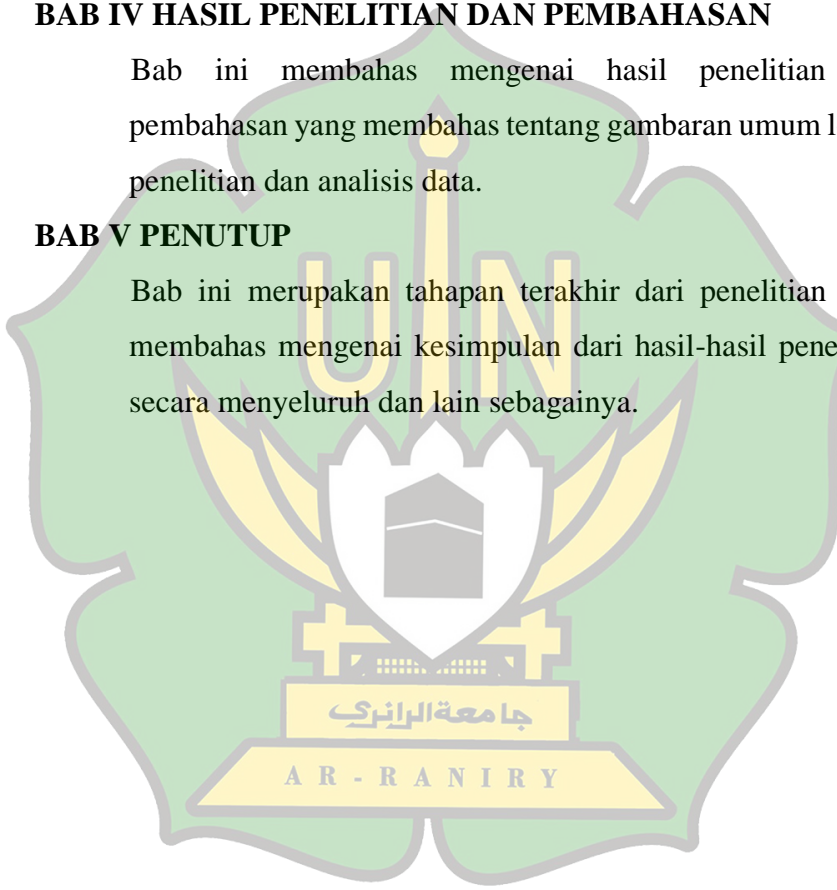
Dalam bab ini diuraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, teknik metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian dan analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan tahapan terakhir dari penelitian yang membahas mengenai kesimpulan dari hasil-hasil penelitian secara menyeluruh dan lain sebagainya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah melibatkan proses di mana pemerintah daerah bersama masyarakat mengelola sumber daya setempat melalui kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Keberhasilan pembangunan ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan menciptakan lapangan kerja yang optimal dari segi jumlah, produktivitas, dan efisiensi. Dengan kata lain, Salah satu indikator utama dalam menganalisis pembangunan ekonomi suatu negara adalah pertumbuhan ekonominya (Wau, *et al.*, 2022:9).

Menurut Pertiwi (2017:36), Pembangunan ekonomi dilakukan secara menyeluruh, terkoordinasi, seimbang, dan berkelanjutan, dengan tujuan menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Untuk mencapai pembangunan ekonomi nasional, diperlukan pembangunan ekonomi daerah yang dapat mengurangi ketimpangan antar daerah dan menciptakan kesejahteraan yang adil dan merata. Kawasan merujuk pada lokasi kegiatan pembangunan atau aktivitas ekonomi seperti industri, perusahaan, fasilitas pelayanan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemilihan lokasi sangat mempengaruhi kelangsungan kegiatan tersebut, dan hasil dari kegiatan ini dapat

dinikmati sebagai upaya meningkatkan keadilan dan kebahagiaan dalam berbagai aspek kehidupan (Herawaty & Bangun, 2018).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang meliputi pembentukan kelembagaan baru, pengembangan industri alternatif, peningkatan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, dan pengembangan bisnis baru. Dalam pembangunan ekonomi daerah, masalah utama terletak pada kebijakan pembangunan yang didasarkan pada karakteristik daerah yang bersangkutan (*endogen*), dan potensi pemanfaatan sumber daya manusia, sistem dan sumber daya material setempat. Orientasi ini menyebabkan diadopsinya inisiatif dari daerah dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Subandi, 2016).

Pembangunan daerah tidak dapat dilakukan di semua sektor ekonomi, tetapi pembangunan sektor-sektor ekonomi dengan potensi pembangunan yang besar diprioritaskan. Industri ini diharapkan tumbuh dan berkembang pesat, sehingga mendorong industri terkait lainnya untuk mengimbangi perkembangan industri potensial tersebut. Tiga tujuan utama pembangunan meliputi: (1) meningkatkan suplai dan memperluas distribusi berbagai kebutuhan dasar hidup seperti pangan, sandang, papan, perlindungan kesehatan dan keselamatan, dan (2) meningkatkan standar hidup. Tercermin dalam bentuk peningkatan pendapatan, juga mencakup peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan

perhatian terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan, yang kesemuanya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan materil, tetapi juga meningkatkan diri. harga diri rakyat dan negara, (3) Memperluas pilihan dan tanggung jawab sosial setiap individu dan seluruh negara, yaitu membebaskan mereka dari jeratan perbudakan dan ketergantungan, tidak hanya terhadap orang atau negara lain, tetapi juga terhadap kekuatan apa pun yang dapat merusak nilai-nilai kemanusiaan mereka (Parera, 2018).

Kunci keberhasilan pembangunan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan adalah koordinasi dan keterpaduan, baik itu keterpaduan antar departemen, antar departemen dan daerah, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, maupun antar provinsi dan kabupaten/kota. Melalui integrasi ini, berarti akan ada kesamaan pandangan, saling isi, dan tidak ada tumpang tindih antara rencana pembangunan daerah dengan daerah lain. Tujuan pembangunan yang diharapkan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil, ketersediaan komersial, dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan daerah adalah dengan menetapkan kota atau wilayah tertentu sebagai pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan ekonomi merupakan cara untuk memajukan dan merangsang pembangunan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (Hertantingsih, 2018).

Pertumbuhan ekonomi menargetkan daerah-daerah yang memiliki potensi dan fasilitas daerah, serta akan mempercepat kemajuan ekonomi, karena kemajuan daerah secara tidak langsung akan memungkinkan masyarakat untuk menemukan kehidupan yang lebih bermartabat di daerahnya. Setelah pelaksanaan pembangunan pusat pertumbuhan, kegiatan koordinasi pusat pertumbuhan dan basis sumber daya pedesaan harus menghasilkan efek menetes ke bawah dan efek difusi, sehingga kegiatan pusat pertumbuhan juga dapat tumbuh. Pada gilirannya, pemerataan kesejahteraan ekonomi dapat terbentuk di daerah pedesaan atau perkotaan, sehingga mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tertinggal (Hertantiningsih, 2018).

Kebijakan pembangunan daerah pada dasarnya adalah pengambilan keputusan dan intervensi pemerintah di tingkat nasional dan daerah untuk memajukan proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Analisis ini sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan di daerah tertinggal. Semua ini diperlukan untuk meningkatkan proses pembangunan daerah dan pada saat yang sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah setempat (Hidayat&Darwin, 2017).

2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian, baik di tingkat nasional maupun regional (daerah). Pertumbuhan ekonomi didefinisikan

sebagai suatu proses di mana kapasitas dari produksi suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat output atau pendapatan yang lebih besar. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara tidak hanya didukung oleh kenaikan stok modal fisik dan jumlah tenaga kerja, tetapi juga peningkatan mutu modal manusia yang memiliki pengaruh kuat terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja serta pemanfaatan kemajuan teknologi (Sukma *et al.*, 2019). Di masa modern ini studi ekonomi semakin berkembang. Banyak sejumlah ilmuwan atau para ahli yang telah mengungkapkan atau mengemukakan teori-teori pertumbuhan. Teori-teori tersebut diantaranya yaitu:

Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana pencapaian setiap wilayah dalam mengembangkan aktivitas ekonomi di daerah asalnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami elemen-elemen yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2006), ada tiga faktor pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Akumulasi modal, yaitu Akumulasi modal melibatkan segala bentuk investasi baru, termasuk tanah (lahan), peralatan fisik (mesin-mesin), dan sumber daya manusia (SDM). Proses akumulasi modal terjadi ketika sebagian dari pendapatan saat ini disimpan dan kemudian diinvestasikan kembali dengan maksud untuk meningkatkan produksi di masa mendatang. Investasi ini juga perlu didukung oleh investasi dalam infrastruktur, seperti pembangunan jalan, penyediaan listrik, air bersih, serta fasilitas

sanitasi dan komunikasi, untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat produksi.

2. Populasi dan pertumbuhan angkatan kerja, Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, yang terkait dengan peningkatan jumlah angkatan kerja (*labor force*), secara tradisional dianggap sebagai faktor positif dalam pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja akan meningkatkan produktivitas, sementara pertumbuhan penduduk yang lebih besar dapat meningkatkan potensi pasar domestik.
3. Kemajuan teknologi, Perkembangan Teknologi disebabkan oleh pengenalan cara-cara baru dan peningkatan cara-cara lama dalam melaksanakan pekerjaan tradisional. Terdapat tiga klasifikasi perkembangan teknologi, yaitu:
 - a. Perkembangan teknologi yang bersifat netral, terjadi ketika tingkat output yang dicapai lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi input yang sama.
 - b. Perkembangan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja (*labor saving*) atau hemat modal (*capital saving*), artinya tingkat output yang lebih tinggi dapat dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang tetap.
 - c. Perkembangan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penerapan

- d. teknologi tersebut memungkinkan pemanfaatan barang modal yang sudah ada secara lebih produktif.

Menurut Amalia (2022:14) dalam buku *Ekonomi Pembangunan*, faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi meliputi:

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM): Kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang tersedia, termasuk pendidikan, keterampilan, dan kesehatan masyarakat.
- 2) Sumber Daya Alam (SDA): Ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam, seperti tanah, air, mineral, dan energi yang berkontribusi pada produksi.
- 3) Modal: Investasi dalam bentuk modal fisik seperti infrastruktur, teknologi, dan peralatan, serta modal finansial yang mendukung kegiatan ekonomi.
- 4) Teknologi: Inovasi dan adopsi teknologi baru yang meningkatkan efisiensi produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 5) Kebijakan Pemerintah: Kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi yang mendorong investasi, perdagangan, dan stabilitas ekonomi.
- 6) Infrastruktur: Fasilitas fisik seperti transportasi, komunikasi, dan energi yang mendukung kegiatan ekonomi.
- 7) Stabilitas Politik dan Hukum: Lingkungan politik yang stabil dan sistem hukum yang efektif, yang menciptakan kepercayaan bagi investor dan pelaku ekonomi.

Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi mencakup peningkatan kapasitas jangka panjang suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Peningkatan tersebut dapat terwujud melalui kemajuan dan penyesuaian teknologi, institusi, serta ideologi terhadap berbagai kondisi yang ada. Perkembangan ekonomi memiliki makna yang lebih luas, melibatkan perubahan menyeluruh dalam struktur ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi umumnya diartikan sebagai proses yang menghasilkan peningkatan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang, didukung oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Laju pertumbuhan ekonomi dianggap penting dan menjadi sumber utama peningkatan standar hidup, yang sangat terkait dengan pertumbuhan penduduk. BPS menyatakan bahwa untuk mengukur sejauh mana perkembangan ekonomi suatu wilayah, dapat dilihat melalui laju pertumbuhan. Pembangunan ekonomi merupakan proses yang terus menerus, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita dalam jangka panjang, serta memperbaiki sistem kelembagaan di berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya. Perbaikan ini dapat dilihat dari aspek organisasi (institusi) dan regulasi, baik yang bersifat formal maupun informal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Partisipasi aktif dari masyarakat, pemerintah,

dan semua elemen dalam negara sangat diperlukan dalam proses pembangunan ini.

2.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Secara umum, pertumbuhan ekonomi klasik mengarah pada konsep yang menjelaskan bagaimana perekonomian tumbuh melalui akumulasi modal, peningkatan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi, dengan penekanan pada peran pasar bebas dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Tokoh-tokoh seperti Adam Smith dan David Ricardo berpendapat bahwa investasi dalam modal fisik dan peningkatan produktivitas tenaga kerja mendorong pertumbuhan ekonomi, namun mereka juga menyadari adanya batasan seperti keterbatasan sumber daya alam dan hukum hasil yang semakin menurun, yang dapat menghambat pertumbuhan dalam jangka panjang (Darmawan, 2018:131).

Menurut teori pertumbuhan ekonomi klasik, penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi ialah karena populasi bertambah dan semakin terbatasnya sumber daya. Para ahli ekonomi klasik membagi empat faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan sumberdaya alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Ahli ekonomi klasik memfokuskan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi karena pertambahan penduduk akan mempengaruhi tingkat produksi nasional dan pendapatan suatu wilayah. Dapat dilihat, apabila terdapat kekurangan penduduk dan produksi marginal lebih tinggi

daripada pendapat per kapita, akan tetapi apabila penduduk sudah semakin bertambah, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu, produksi marginal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya (Krisnawati, 2021).

2.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

Teori Neoklasik mengatakan bahwa, tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi yang dapat dilihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik sehingga produktivitas perkapita meningkat (Darmawan, 2018:135). Samuelson dalam Rahmawati, et al (2022) menjelaskan, setiap negara atau wilayah perlu melihat sektor atau komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor tersebut memiliki competitive advantage untuk dapat dikembangkan. Artinya dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai relatif singkat dan besaran sumbangan untuk perekonomian juga cukup besar. perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain untuk itu berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh.

2.2.3 Teori Schumpeter

Teori *Schumpeter* menekankan tentang pentingnya peranan para pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini dijelaskan bahwa pengusaha merupakan golongan yang akan

terus menerus membuat pembaharuan (inovasi) dalam bidang ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan produk-produk baru, mempertinggi efisiensi cara produksi dalam menghasilkan suatu barang. Memperluas pasar ke pasar-pasar yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah baru dan mengadakan perubahan-perubahan positif dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi koefisiensi kegiatan perusahaan (Palindangan dan Bakar, 2021).

2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB dapat dijadikan sebagai indikator laju pertumbuhan ekonomi sektoral agar dapat diketahui sektor-sektor mana saja yang menyebabkan perubahan pada pertumbuhan ekonomi. Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun dengan memperhitungkan unsur inflasi dan dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar dan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun dengan tidak memperhitungkan unsur inflasi (Hajeri, 2015).

Satu-satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengukur total

nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional. Produk Domestik Regional Bruto untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka. Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Boediono, 2015).

Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar (BPS, 2015). Hal ini sejalan dengan Bappenas (2003) yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi diukur dari PDRB. Angka PDRB atas dasar harga konstan yaitu PDRB yang sudah mengeliminasi faktor inflasi. Berarti untuk melihat kenaikan pendapatan yang riil adalah PDRB

atas harga konstan. Fungsi PDRB harga konstan adalah untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari Perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun n terhadap nilai pada tahun- n (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke $n-1$, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya (BPS, 2015).

2.4 Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah berhubungan langsung dengan besarnya permintaan akan barang dan jasa di wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan nonbasis, akan tetapi hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Kegiatan basis adalah kegiatan yang tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi sebagai pendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lain, sedangkan pekerjaan non basis adalah kegiatan yang bersifat endogen atau tidak dapat tumbuh bebas, artinya kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri dan pertumbuhannya tergantung pada kondisi umum perekonomian wilayah tersebut (Tarigan, 2005).

Teori basis ekonomi berupaya untuk menemukan dan mengenali aktivitas basis dari suatu wilayah, kemudian meramalkan aktivitas itu dan menganalisis dampak tambahan dari aktivitas ekspor tersebut. Konsep kunci dari teori basis ekonomi adalah bahwa kegiatan ekspor merupakan mesin pertumbuhan. Tumbuh tidaknya suatu wilayah ditentukan oleh bagaimana kinerja wilayah itu terhadap permintaan akan barang dan jasa dari luar. Lebih lanjut dalam analisis teori basis ekonomi, teori tersebut dapat digunakan sektor dan subsektor potensial di Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Apabila sektor potensial tersebut dapat dikembangkan dengan baik tentunya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Menurut teori ini, suatu daerah dapat dibedakan menjadi daerah andalan dan bukan andalan, yang selanjutnya dimodifikasi menjadi sektor/subsektor ekonomi potensial dan bukan sektor/subsektor ekonomi potensial (Jumiyanti, 2018). Sektor basis yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan kompetitif (*competitive advantage*) yang cukup tinggi. Sektor non basis adalah sektor-sektor lainnya yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis (*service industries*), (Sjafrizal, 2008).

2.5 Indikator dan Tolak Ukur Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Arifin 2018) Produk Domestik Bruto (PDB), yang disebut Gross Domestic Product (GDP) merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai keadaan ekonomi dan pencapaian pembangunan dalam suatu negara selama periode tertentu, baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Sementara itu, untuk mengukur kondisi ekonomi di tingkat daerah, seperti Provinsi, Kabupaten, atau Kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang dalam bahasa Inggris disebut Gross Domestic Regional Product (GDRP).

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, sebagai contoh perhitungan PDB dan PDRB di Indonesia menggunakan tahun dasarnya yaitu tahun 2000. Penentuan PDRB atas harga konstan, biasanya diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi

secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). dimana Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan. Perhitungan PDB maupun PDRB secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

1. Pendekatan Produksi

Penghitungan PDRB dengan pendekatan produksi adalah penjumlahan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu daerah selama periode tertentu (biasanya satu tahun). PDRB ini dikelompokkan dalam 9 sektor ekonomi berdasarkan Klasifikasi Standar Industri Internasional (ISIC):

- a. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan: mencakup tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan.
- b. Sektor pertambangan dan penggalian: mencakup pertambangan minyak dan gas, pertambangan nonmigas, dan penggalian.
- c. Sektor industri pengolahan: mencakup industri migas (pengilangan, gas alam cair) dan nonmigas (makanan, minuman, tekstil, produk kulit, kertas, kimia, logam, mesin, transportasi, dll.).

- d. Sektor listrik, gas, dan air bersih: mencakup listrik, gas, dan air bersih.
 - e. Sektor konstruksi: mencakup pembangunan gedung, jalan, jembatan, dll.
 - f. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran: mencakup perdagangan besar/eceran, hotel, dan restoran.
 - g. Sektor pengangkutan dan komunikasi: mencakup angkutan (rel, jalan, laut, udara, dan sebagainya) serta komunikasi publik.
 - h. Sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan: mencakup perbankan, lembaga keuangan nonbank, real estate, dan jasa perusahaan.
 - i. Sektor jasa-jasa: mencakup pemerintahan, jasa sosial, hiburan, rekreasi, dan jasa perorangan/rumah tangga.
2. Pendekatan Pengeluaran
- Perhitungan PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran/penggunaan dikelompokkan dalam 6 komponen yaitu:
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang, dan jasa dikurangi dengan penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan rumah tangga selama setahun.
 2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang, baik pemerintah pusat dan daerah, tidak termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa

yang dihasilkan. Data yang dipakai adalah realisasi APBD. 3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, mencakup pembuatan dan pembelian barang- barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal bekas atau baru dari luar negeri. Metode yang dipakai adalah pendekatan arus barang. 4. Perubahan Inventori. Perubahan stok dihitung dari PDRB hasil penjumlahan nilai tambah bruto sectoral dikurangi komponen permintaan akhir lainnya. 5. Ekspor Barang dan Jasa. Ekspor barang dinilai menurut harga free on board (fob) 6. Impor Barang dan Jasa. Impor barang dinilai menurut *cost insurance freight* (CIF).

3. Pendekatan Pendapatan

Perhitungan PDRB dengan pendekatan pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi) Produk Nasional Bruto (PNB) adalah PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto luar negeri adalah pendapatan atas factor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia.

Pendapatan Nasional adalah PNB dikurangi dengan pajak tidak langsung (neto) dan penyusutan. Pajak tidak langsung neto adalah pajak tidak langsung dikurangi dengan subsidi pemerintah. Indeks implisit PDB merupakan rasio antara PDB harga Berlaku dengan PDB harga konstan. Deflator PDB adalah laju pertumbuhan indeks implisit PDB. Ekspor barang dan impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk Indonesia dengan penduduk negara lain.

Pembangunan ekonomi terdiri dari dua kata yaitu pembangunan dan ekonomi. Menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, pembangunan adalah hasil pekerjaan membangun, sedangkan ekonomi adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan pengolahan barang industri, pertanian dan perdagangan (Badudu, 2001). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat menyeluruh, seimbang dan berkelanjutan yang mengakibatkan perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi ketimpangan daerah serta menghapuskan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi (Sirojuzilam, 2008). Tujuan dari pembangunan ekonomi ada dua tahap. Tahap pertama, pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan, a pabila tujuan ini sudah terealisasikan, maka tahap kedua adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Sirojuzilam, 2010).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang meliputi pembentukan kelembagaan baru, pengembangan *industry*

alternative, peningkatan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi dan pengembangan bisnis baru. Dalam pembangunan ekonomi daerah, masalah utama terletak pada kebijakan pembangunan yang didasarkan pada karakteristik daerah yang bersangkutan (endogen), dan potensi pemanfaatan sumber daya manusia, sistem dan sumber daya material setempat. Orientasi ini menyebabkan diadopsinya inisiatif dari daerah dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Subandi, 2016). Tiga tujuan dari pembangunan ekonomi menurut (Todaro, 2010):

- a) Perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan hak perlindungan keamanan.
- b) Meningkatkan standar hidup masyarakat yang tidak hanya sebatas peningkatan pendapatan, tetapi juga tersedianya lapangan pekerjaan, memperbaiki kualitas pendidikan serta meningkatkan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, untuk menumbuhkan harga diri pada setiap individu dan bangsa yang bersangkutan.
- c) Memperluas pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu masyarakat, yakni dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan.

Pembangunan ekonomi daerah adalah sebuah prose pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh kerjasama antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru untuk merangsang berkembangnya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat mengelola sumberdaya yang ada dengan maksimal, orientasi ini mengarah kepada pengambilan kebijakan yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk mengembangkan kegiatan perekonomian di wilayah tersebut (Arsyad, 2010).

Hingga saat ini, belum ada satu teori mana pun yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif. Namun demikian, ada beberapa teori yang secara parsial dapat membantu untuk memahami arti penting dari pembangunan ekonomi daerah. Pada dasarnya, inti dari teori-teori tersebut berkisar antara dua hal, yaitu pembahasan tentang metode yang menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu (Lincoln 2002).

2.6 Struktur Ekonomi dan Perubahan Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi merupakan sistem ekonomi yang sedang berlangsung di tengah masyarakat, yang menjelaskan kondisi ekonomi masyarakat dari sisi menghasilkan produksi. Struktur ekonomi itu sendiri pada dasarnya akan berubah seiring dengan kondisi ekonomi suatu daerah. Perubahan yang direncanakan pemerintah dalam kebijakan ekonomi akan tergambar jelas dalam

struktur ekonomi yang dihasilkan. Struktur ekonomi itu sendiri terjadi akibat dari kebijakan pembangunan ekonomi yang diterapkan (Kosuma, 2016).

Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Struktur ekonomi juga merupakan implementasi dari sistem-sistem ekonomi yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara melalui pembangunan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan nasional. Struktur perekonomian dapat dilihat dari empat sudut tinjauan, yaitu tinjauan makro-sektoral, tinjauan keuangan, tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, dan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Tinjauan makro sektoral dan tinjauan keuangan adalah merupakan tinjauan ekonomi murni sedangkan tinjauan kenegaraan dan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan adalah tinjauan di bidang politik (Widiyati *et al.*, 2023).

Perubahan struktur ekonomi, peningkatan output, tetapi tidak diiringi dengan perubahan struktur tenaga kerja tentunya menjadi masalah tersendiri dalam proses pembangunan ekonomi daerah. Dengan kata lain, perubahan pendapatan itu sendiri tumbuh lebih cepat daripada perubahan struktur tenaga kerja. Untuk dapat melihat permasalahan kesempatan kerja yang terbatas, tentunya tidak hanya memperhatikan penyediaan lapangan pekerjaan tetapi perlunya melihat dari sisi permintaan tenaga kerja (Prakoso, 2006). Struktur tenaga kerja berkaian erat dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia akan terhambat apabila

tidak diiringi dengan kemajuan infrastruktur, baik itu melalui bentuk pendidikan ataupun kesehatan (Kristriantono dan Yuliawati, 2022).

2.6.1. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Tahap pertama perencanaan bagi setiap lembaga yang terkait dalam pembangunan ekonomi daerah adalah menentukan peran yang nantinya akan dilakukan dalam proses pembangunan. Ada 4 peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu sebagai:

- a. *Enterprenuer*, dengan perannya sebagai entrepreneur, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dalam lembaga BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dapat mengembangkan usahanya sendiri. Semua aset pemerintahan daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.
- b. Koordinator, sebagai koordinator pemerintah daerah dapat bertindak untuk menetapkan kebijakan, untuk mengusulkan strategi-strategi pembangunan di daerahnya. Perluasan dari peranan ini dalam pembangunan ekonomi dapat melibatkan kelompok-kelompok di masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi ekonomi, seperti kesempatan kerja, angkatan kerja dan pengangguran. Dalam peranannya sebagai koordinator, pemerintah daerah juga dapat melibatkan lembaga-lembaga

pemerintahan lainnya, dunia usaha serta masyarakat dalam penyusunan strategi-strategi. Pendekatan ini sangat potensial dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah dengan nasional dan menjamin bahwa perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat yang maksimum.

- c. Fasilitator, dengan fungsi fasilitator Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan mengenai perilaku atau budaya masyarakat di daerahnya. Dengan ini, maka akan mempercepat proses pembangunan dan produser perencanaan serta pengaturan penetapan daerah yang lebih baik.
- d. Stimulator, pemerintah daerah dapat memberikan stimulant penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang akan masuk ke daerah tersebut dan menjaga perusahaan-perusahaan yang telah ada supaya tetap berada dan beroperasi di daerah tersebut. Hal ini bias dilakukan dengan cara pembangunan kawasan industri serta membantu industri kecil melakukan pameran (Arsyad, 2002).

2.7 Sektor Unggulan

Halid, *et al* (2023) mendefinisikan sektor unggulan sebagai sekumpulan sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Sektor ini biasanya memiliki keunggulan kompetitif atau komparatif, seperti

sumber daya alam yang melimpah, teknologi canggih, tenaga kerja terampil, atau pasar yang kuat. Sektor unggulan berperan penting dalam peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan daerah, serta sering menjadi fokus dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Kriteria penentuan sektor unggulan biasanya terkait dengan perbandingan, baik perbandingan regional, nasional maupun internasional. Dalam konteks internasional, jika sektor tersebut dapat bersaing dengan sektor yang sama di negara lain, maka sektor tersebut disebut unggulan. Pada saat yang sama, di tingkat nasional, jika suatu industri di suatu daerah dapat bersaing di pasar domestik atau domestik dengan industri yang sama yang diproduksi di daerah lain, industri tersebut dapat digolongkan sebagai industri unggulan. Jika suatu daerah dapat memenangkan persaingan dengan daerah lain di sektor yang sama, sehingga dapat berproduksi dan mengekspor, maka daerah tersebut akan memiliki sektor unggulan (Rajab dan Rusli, 2019).

Sektor ekonomi unggulan sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah, departemen terkemuka tidak hanya mengacu pada letak geografis, tetapi juga mengacu pada departemen yang menyebar melalui berbagai jalur ekonomi, yang dapat mendorong seluruh pembangunan ekonomi. Sektor unggulan adalah sektor yang dapat merangsang pertumbuhan atau perkembangan sektor lain, termasuk sektor yang memberikan input dan sektor yang menggunakan produknya sebagai input dalam proses produksi

(Widodo dalam Adyatama, 2018). Sektor unggulan harus memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan sektor lain di suatu wilayah, terutama faktor pendukung sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dimungkinkan juga untuk menciptakan peluang investasi dengan meningkatkan potensi sektor unggulan di daerah terkait (Hailudin et al., 2023).

Terdapat empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor unggulan, yaitu: 1) sektor unggulan memiliki laju pertumbuhan yang tinggi, 2) sektor unggulan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar, 3) sektor unggulan memiliki keterikatan antar sektor yang tinggi baik kedepan maupun kebelakang, 4) sektor unggulan harus mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi (Rachibi, 2001). Dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang dapat dikembangkan untuk mendukung kontribusinya terhadap pendapatan daerah dapat dilakukan melalui pendekatan yang menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB meningkat di suatu wilayah dilihat dari laju pertumbuhan dan kontribusi sektor.
2. Kesejahteraan penduduk meningkat, hal ini berpengaruh pada perkembangan sektor.
3. Memiliki potensi pasar yang prospektif, baik pasar lokal, regional maupun pasar internasional.
4. Efisiensi investasi, yaitu dengan investasi yang kecil dapat menghasilkan output yang sebesar-besarnya.

5. Memiliki skala ekonomi yang besar sehingga potensial untuk dikembangkan.
6. Mempunyai kontribusi yang besar terhadap kegiatan ekonomi pada wilayah tersebut.
7. Menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar.
8. Memiliki dampak spasial yang besar dalam mendorong pengembangan wilayah, baik dalam lingkup provinsi maupun nasional.

2.8 Penelitian Terkait

Penelitian mengenai analisis perubahan struktur perekonomian dan sektor unggulan bukan sebuah penelitian yang baru, banyak peneliti-peneliti terdahulu yang telah meneliti dan mengkaji permasalahan ini. Untuk memperkuat latar belakang dan landasan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka terdapat penelitian terkait yang digunakan penulis sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait dengan Skripsi

No.	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Zulfi Laili Indra N, (2019)	“Analisis Sektor Unggulan dan Perubahan Struktur Ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017”.	Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian LQ dan <i>Shift Share</i> .	Perbedaan penelitian ini yaitu lokasi penelitian
2	Daisy S. M. Engka Dkk, (2019)	“Analisis Sektor Ekonomi Unggulan di Kab. Sorong Selatan”.	Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian LQ dan <i>Shift Share</i> .	Perbedaan penelitian ini yaitu lokasi penelitian
3	Hermin Purnamasari, (2018)	“Analisis Perubahan Struktur Perekonomian dan Penentu Sektor Unggulan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016”.	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode <i>Shift share</i> , dan sama-sama mencari nilai sektor unggulan.	Perbedaan penelitian yaitu metode yang digunakan jenis metode <i>Shift Share Klasik</i> dan <i>Shift Share Esteban Marquillas</i> serta lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian ini tidak menggunakan LQ sedangkan penulis menggunakan metode LQ
4	Andik Waloyo, (2018)	“Analisis Potensi Ekonomi dan Sektor Unggulan Ekonomi di Kabupaten	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode <i>Shift share</i> , dan	Perbedaan penelitian yaitu metode yang digunakan jenis metode <i>Shift Share Klasik</i>

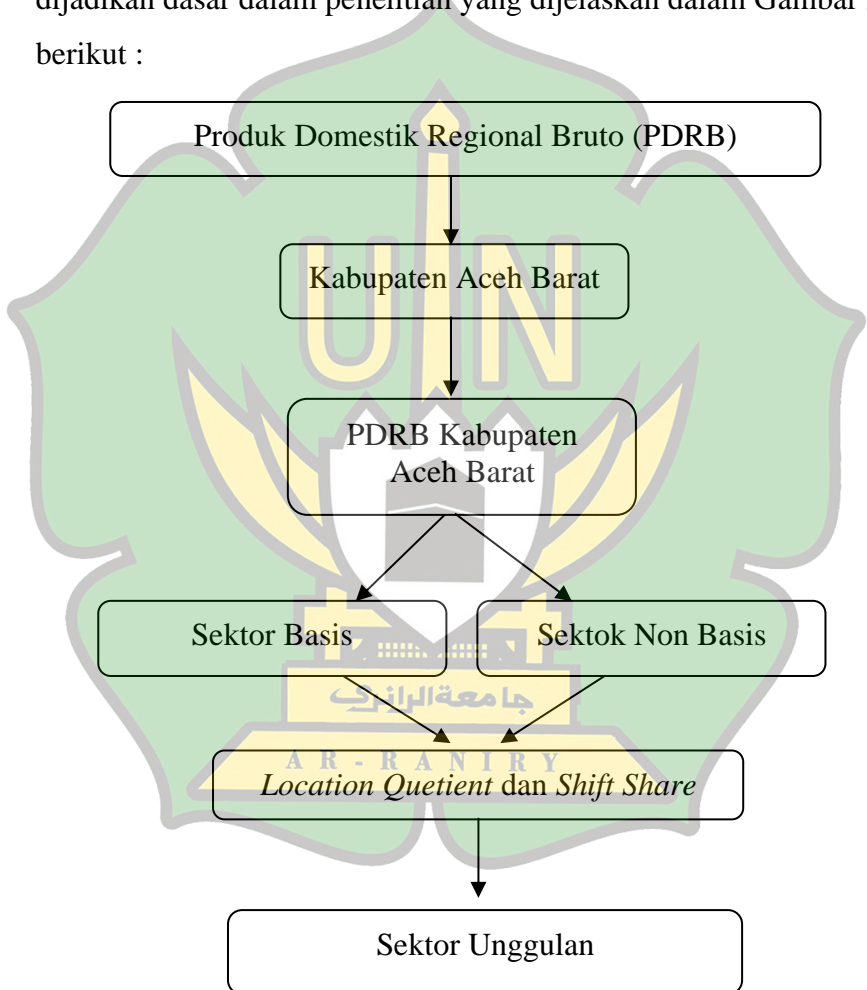
		Grobogan tahun 2010-2015”	sama-sama mencari nilai sektor unggulan.	dan <i>Shift Share Esteban Marquillas</i> serta lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian ini tidak menggunakan LQ sedangkan penulis menggunakan metode LQ. Serta lokasi penelitian yang berbeda.
5	Ismail Ibrahim, (2018)	“Analisis Potensi Sektor Ekonomi dalam Upaya Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Empiris di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo pada 2012-2016)”	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode LQ, dan sama-sama mencari nilai sektor unggulan.	Perbedaan penelitian yaitu metode yang digunakan jenis metode LQ dan tidak menggunakan <i>Shift Share</i> sedangkan metode yang digunakan penelitian yaitu LQ dan <i>Shift Share</i> . Serta lokasi yang berbeda
6	Kalzum R, (2018)	“Analisis <i>Location Quotient</i> dalam Penentuan Sektor Basis dan Non basis di Kabupaten Gorontalo”	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode LQ, dan sama-sama mencari nilai sektor unggulan.	Perbedaan penelitian yaitu metode yang digunakan jenis metode LQ dan tidak menggunakan <i>Shift Share</i> sedangkan metode yang digunakan penelitian yaitu

				LQ dan <i>Shift Share</i> . Serta lokasi yang berbeda
7	Ruth Y Hutabarat, (2020)	“Analisis Mengenai Penentuan Sektor Unggulan di Kabupaten Kepulauan Anambas”	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode LQ dan <i>Shift Share</i> , dan sama-sama mencari nilai sektor unggulan.	Perbedaan penelitian yaitu metode yang digunakan jenis metode LQ, <i>Shift Share</i> , dan Tipologi Klassen sedangkan metode yang digunakan penelitian yaitu LQ dan <i>Shift Share</i> . Serta lokasi yang berbeda
8	Mahmud Basuki, (2017)	“Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman dengan Metode Shift Share dan Location Quofient”	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode LQ dan <i>Shift Share</i>	Perbedaan penelitian ini yaitu lokasi penelitian

2.9 Kerangka Pemikiran

PDRB suatu wilayah dapat menganalisis mengenai struktur perekonomian wilayah tersebut, peran disetiap sektor serta bagaimana pergeserannya. Terdapat dua analisis yang digunakan untuk menentukan perubahan struktur perekonomian dan sektor mana yang memajukan perekonomian di kabupaten Aceh Barat, yaitu *location quofient* dan *shift share*. Dari dua alat analisis tersebut,

dapat diketahui sektor mana saja yang termasuk ke dalam sektor unggulan yang ada di Kabupaten Aceh Barat sehingga dapat lebih memfokuskan pada sektor tersebut dan pembangunan yang ada akan semakin maju dan mengalami peningkatan. Kerangka penelitian ini dijadikan dasar dalam penelitian yang dijelaskan dalam Gambar 2.1 berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Aceh Barat.

2.10 Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Aceh Barat

2.10.1 Sektor Unggulan

Menurut Moedjiono (2021), sektor unggulan merupakan bidang ekonomi yang memiliki potensi signifikan untuk memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara. Sektor ini umumnya memiliki keunggulan kompetitif atau komparatif dibandingkan sektor lain, baik dari segi sumber daya alam, teknologi, keterampilan tenaga kerja, maupun infrastruktur yang ada. Sektor unggulan sering menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan ekonomi karena perannya yang penting dalam meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi. Di samping itu, Aldiansyah (2019) menyebutkan bahwa secara umum terdapat delapan sektor unggulan (basis) di Indonesia yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; pengadaan air; konstruksi; informasi dan komunikasi; *real estate*; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor-sektor ini menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah di Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

2.10.2 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2017:10), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi masyarakat meningkat secara terus-menerus

dan ditandai dengan peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) di suatu wilayah dalam periode tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dihitung dengan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Selain itu, dampak pola ekonomi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sebuah kabupaten. Sebaliknya, pola ekonomi sektor non-unggulan menunjukkan pengaruh negatif atau tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten tersebut (Qubro, *et.al.*, 2021).

2.10.3 Sektor Unggulan Kabupaten Aceh Barat

Sektor unggulan merupakan sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif di suatu daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Di Kabupaten Aceh Barat, sektor unggulan biasanya mencakup bidang-bidang yang memiliki potensi besar untuk berkembang dan mendukung perekonomian daerah. Syahputra (2015) menyebutkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan merupakan sektor unggulan maju dan tumbuh pesat dan merupakan sektor basis kompetitif terspesialisasi dengan kontribusi yang besar terhadap PDRB di Provinsi Aceh. Pemerintah daerah kabupaten Aceh Barat untuk dapat memperhatikan dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi, dengan menggunakan kebijakan yang potensial dalam pengembangan sektor ekonomi dan memberi dampak untuk peningkatan pendapatan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan alat analisis yaitu analisis *shift share* dan analisis *location quotient*. Analisis ini bertujuan untuk melihat perubahan sektor unggulan serta untuk melihat perubahan struktur perekonomian daerah. Peneliti mengambil data-data yang dikumpulkan untuk dianalisis dan diidentifikasi sektor-sektor perekonomian yang menjadi sektor basis dan menjadi penggerak perekonomian menggunakan pendekatan kuantitatif, yang berupa data Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Aceh Barat (Nurlina *et al.*, 2019).

3.2 Sampel Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022, dengan menggunakan sampel 1 kabupaten (Aceh Barat).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang tidak memberikan data langsung kepada pengumpul data. Data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan dapat menunjang penelitian ini (Sugiyono, 2017). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk runtut waktu (time series) atau disebut data

tahunan, yaitu data PDRB Kabupaten Aceh Barat berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha (sektoral) dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu informasi mengenai cara mengukur variable yang diteliti serta memberikan informasi untuk peneliti lain dengan variable yang sama.

3.4.1. PDRB atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto adalah penambahan nilai bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi di wilayah domestik di suatu negara, tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki tersebut residen atau tidak residen, yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dengan tujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha. (BPS, 2021)

3.4.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses sebuah kegiatan perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah, sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Indikator yang digunakan dalam mengukur laju pertumbuhan ekonomi daerah adalah tingkat pertambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa

melihat tingkat pertumbuhan penduduk dan ada perubahan atau tidak dalam pergeseran struktur ekonomi (Sukirno, 2011).

3.4.3. Sektor-Sektor Ekonomi

Sektor ekonomi adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan ekonomi kedalam beberapa kelompok tertentu. Kegiatan ekonomi yang beragam menyebabkan struktur perekonomian yang beragam pula tergantung bagaimana peran atau kontribusi dari setiap sektor ekonomi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Aceh Barat, terdapat 17 sektor-sektor ekonomi, diantaranya:

1. Pertanian kehutanan dan perikanan.
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Pengadaan listrik dan gas
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
8. Transportasi dan pergudangan
9. Penyediaan akomodasi makan dan minum
10. Informasi dan komunikasi
11. Jasa dan keuangan asuransi
12. *Real estate*
13. Jasa perusahaan
14. Administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib

15. Jasa Pendidikan
16. Jasa kesehatan dan kegiatan social
17. Jasa lainnya.

3.4.4. Sektor Unggulan

Sektor unggulan merupakan sektor ekonomi yang unggul baik dilihat dari segi pertumbuhan maupun dari segi kontribusi terhadap PDRB. Sektor unggulan adalah sektor yang yang dapat dikembangkan lebih lanjut dan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Sektor unggulan mampu memenuhi permintaan dari dalam daerahnya serta mampu untuk memenuhi permintaan dari luar daerah. Sektor unggulan juga merupakan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja yang sesuai dengan skala produksi. Dengan mengetahui sektorsektor mana saja yang unggul, maka dapat memiliki peluang untuk mengambil kebijakan yang sesuai dengan potensi yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Sektor unggulan dapat menjadi dasar pertimbangan perencanaan pembangunan daerah dimasa yang akan datang. Sektor unggulan memberikan keunggulan kompetitif atau komparatif yang selanjutnya dapat mendorong pengembangan ekspor barang maupun jasa pada suatu wilayah sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.

Menurut Rachbini (2001:54), terdapat empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor unggulan/prioritas, yakni :

1. Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut.
2. Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas.
3. Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah.
4. Sektor tersebut harus berkembang, sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektorsektor lainnya.

Selanjutnya faktor ini berkembang lebih lanjut melalui kegiatan investasi dan menjadi tumpuan kegiatan ekonomi. Kriteria sektor unggulan akan sangat bervariasi. Hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah, diantaranya : Pertama, sektor unggulan tersebut memiliki laju tumbuh yang tinggi. Kedua, sektor tersebut memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar. Ketiga, sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang. Keempat, dapat juga diartikan sebagai sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi (Safwadi dan Rangkuti, 2018).

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini, teknik analisis datanya menggunakan analisa deskriptif, yang mana untuk menggambarkan berbagai karakteristik data, mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih, sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain. variabel tersebut dapat menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai bidang tertentu, atau merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif (Sujarweni, 2015).

Terdapat empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor unggulan, yaitu: 1) sektor unggulan memiliki laju pertumbuhan yang tinggi, 2) sektor unggulan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar, 3) sektor unggulan memiliki keterikatan antar sektor yang tinggi baik kedepan maupun kebelakang, 4) sektor unggulan harus mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi (Rachibi, 2001). Dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang dapat dikembangkan untuk mendukung kontribusinya terhadap pendapatan daerah dapat dilakukan melalui pendekatan yang menggunakan kriteria sebagai berikut;

1. Pertumbuhan PDRB meningkat di suatu wilayah dilihat dari laju pertumbuhan dan kontribusi sektor.
2. Kesejahteraan penduduk meningkat, hal ini berpengaruh pada perkembangan sektor.
3. Memiliki potensi pasar yang prospektif, baik pasar lokal, regional maupun pasar internasional.
4. Efisiensi investasi, yaitu dengan investasi yang kecil dapat menghasilkan output yang sebesar-besarnya.
5. Memiliki skala ekonomi yang besar sehingga potensial untuk dikembangkan.
6. Mempunyai kontribusi yang besar terhadap kegiatan ekonomi pada wilayah tersebut.
7. Menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar.
8. Memiliki dampak spasial yang besar dalam mendorong pengembangan wilayah, baik dalam lingkup provinsi maupun nasional (Mulyanto, 1999).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis *location quotient* (LQ) yaitu untuk mengetahui sektor unggulan yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Untuk melihat perubahan dan pergeseran sektor perekonomian di Kabupaten Aceh Barat dianalisis menggunakan teknik *shift share* (SS)

3.5.1. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Teknik analisis *location quotient* adalah suatu pendekatan tidak langsung untuk mengukur kinerja basis ekonomi suatu wilayah guna melakukan pengujian sektor-sektor ekonomi yang termasuk ke

dalam sektor unggulan (Arsyad, 2010: 390). Untuk menentukan sektor basis dan non basis di Kabupaten Aceh Barat digunakan metode analisis *Location Quotient* (LQ). Metode LQ digunakan sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan dari PDRB Kabupaten Aceh Barat yang memicu terjadinya pertumbuhan ekonomi. Metode LQ digunakan untuk mengkaji kondisi perekonomian serta mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian. Perhitungan *location quotient* (LQ) menggunakan rumus: (Tarigan, 2004)

$$\text{Location Quotient (LQ)} = \frac{S_i/S}{N_i/N}$$

Keterangan :

Lq = Nilai *Location Quotient*

S_i = PDRB setor i di Kabupaten Aceh Barat

S = PDRB total Kabupaten Aceh Barat

N_i = PDRB sektor i di Provinsi Aceh

N = PDRB total di Provinsi Aceh

Berdasarkan rumus diatas maka ada 3 (tiga) kemungkinan nilai LQ yang ditemukan, yaitu:

1. Nilai LQ di sektor $i = 1$

maka hal ini berarti laju pertumbuhan sektor i di Kabupaten Aceh Barat adalah sama dengan laju pertumbuhan di sektor yang sama dalam perekonomian Provinsi Aceh.

2. Nilai LQ di sektor $i > 1$

Berarti laju pertumbuhan sektor i di Kabupaten Aceh Barat lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dengan perekonomian Provinsi Aceh. Maka, sektor i merupakan sektor unggulan juga merupakan sektor basis ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh Kabupaten Aceh Barat.

3. Nilai LQ di sektor $i < 1$

Hal ini berarti laju pertumbuhan sektor i di Kabupaten Aceh Barat lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian Provinsi Aceh. Maka, sektor i bukan merupakan sektor basis serta tidak dapat dikembangkan lebih lanjut di Kabupaten Aceh Barat (Nurlina *et al.*, 2019).

Dalam mengukur LQ menggunakan pendekatan nilai tambah atau PDRB (Tarigan, 2009 dalam Dodik, 2012) adalah sebagai berikut:

$$LQ_n = (V_i/V_t) / (Y_i/Y_t)$$

dimana:

V_i : Nilai PDRB sektor i pada tingkat wilayah yang rendah

V_t : Nilai PDRB pada tingkat wilayah yang lebih rendah

Y_i : Nilai PDRB sektor i pada tingkat wilayah yang lebih atas

Y_t : Total PDRB pada tingkat PDRB yang lebih atas

Dalam teknik ini, kegiatan ekonomi suatu daerah dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu: (Arsyad, 1999) ;

- a. sektor basis adalah sektor ekonomi yang mampu untuk memenuhi kebutuhan baik pasar domestik maupun pasar luar daerah itu sendiri. Artinya sektor ini dalam aktivitasnya mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri maupun daerah lain dan dapat dijadikan sektor unggulan;
- b. sektor non basis merupakan sector ekonomi yang hanya mampu memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri, sektor seperti ini dikenal sebagai sektor non unggulan.

Location Quotient (kosien lokasi) atau disingkat LQ adalah suatu perbandingan tentang besarnya peran suatu sektor atau industri di suatu daerah terhadap besarnya peran sektor atau industri tersebut secara nasional. Bila $LQ \geq 1$ artinya peran sektor tersebut di daerah itu lebih menonjol dari pada peran wilayah itu secara rasional. Sebaliknya, bila $LQ < 1$ artinya peran sector tersebut di daerah itu lebih kecil dari pada peran sektor itu secara rasional. $LQ \geq 1$ menunjukkan sektor i itu cukup menonjol perannya di daerah tersebut dan seringkali sebagai petunjuk bahwa daerah tersebut surplus akan produksi sektor i tersebut dan mengekspornya ke daerah lain. Daerah itu hanya mungkin mengekspor produk tersebut di daerah lain serta luar negara karena mampu

3.5.2. Analisis *Shift Share*

Analisis *shift share* dapat digunakan untuk membandingkan perbedaan pertumbuhan sektoral antar wilayah administrasi yang lebih rendah dan wilayah administrasi yang lebih tinggi atau sering disebut tingkat nasional. Analisis *shift share* yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui perbedaan pergeseran sektor pada perekonomian wilayah di Kabupaten Aceh Barat. Hasil analisis *shift share* akan menggambarkan kinerja sektor- sektor dalam PDRB Kabupaten Aceh Barat dibandingkan Provinsi Aceh. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyimpangan yang terjadi sebagai hasil perbandingan tersebut. Apabila penyimpangan tersebut positif, maka dikatakan suatu sektor dalam PDRB Kabupaten Aceh Barat memiliki keunggulan kompetitif atau sebaliknya. Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam 3 bidang yang berhubungan satu sama lain, yaitu:

1. *National Share* untuk mengetahui pergeseran struktur perekonomian suatu daerah yang dipengaruhi oleh pergeseran perekonomian nasional. Hasil perhitungan akan menggambarkan peranan pertumbuhan nasional yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah.
2. *Proportional shift* untuk melihat pengaruh sektor i secara nasional akan pertumbuhan perekonomian sektor i pada daerah yang dianalisis. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah

terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan acuan.

3. *Differential Shift* menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh karena itu, jika pergeseran diferensial dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya saingnya ketimbang industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan (Nurlina *et al.*, 2019).

Perhitungan analisis *Shift Share* dengan rumus sebagai berikut :

$$\Delta E_{r,i,t} = (NS_i + P_{r,i} + D_{r,i})$$

Perhitungan *National Share* adalah sebagai berikut:

$$NS_{i,t} = E_{r,i,t-n} (E_{N,t} / E_{N,t-n}) - E_{r,i,t-n}$$

Perhitungan *Proportional Share* adalah sebagai berikut:

$$P_{r,i,t} = \left\{ (E_{N,i,t} / E_{N,i,t-n}) - (E_{N,t} / E_{N,t-n}) \right\} \times E_{r,i,t-n}$$

Perhitungan *Differential Shift* adalah sebagai berikut:

$$D_{r,i,t} = \left\{ E_{r,i,t} - (E_{N,i,t} / E_{N,i,t-n}) E_{r,i,t-n} \right\}$$

Dimana $\Delta E_{r,i,t}$ adalah tambahan semua sektor : NS_i adalah *National Share*, $P_{r,i}$ adalah *Proportional Share*, $D_{r,i}$ adalah *Differential Shift*. (Tarigan, 2005)

$\Delta E_{r,i,t}$: Tambahan semua sektor

NS_i : *National Share*

$P_{r,i}$: <i>Proportional Shift</i>
$D_{r,I}$: <i>Differential Shift</i>
Δ	: Pertambahan, angka akhir (tahun t) dikurangi dengan angka awal (tahun t – n)
N	: <i>National</i> atau Wilayah Nasional/Wilayah yang Lebih Tinggi Jenjangnya
r	: Region atau Wilayah Analisis
E	: Employment atau Banyaknya Lapangan Kerja
i	: Sektor Industri
t	: Tahun
t – n	: Tahun Awal
t + m	: Tahun Proyeksi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambar Umum Lokasi Penelitian

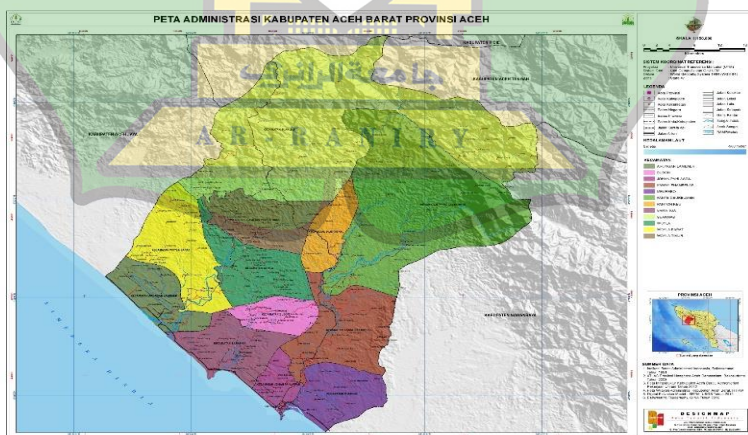
Aceh Barat adalah salah satu Kabupaten provinsi Aceh memiliki kewenangan otonom dalam menjalankan pemerintahan dan membangun serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, merencanakan, mengelola dan memanfaatkan potensi unggulan ekonomi secara optimal serta dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di kabupaen Aceh Barat. Sebagai daerah yang dalam keadaan berkembang dan terus membangun kabupaten Aceh Barat juga mengandalkan sumber hasil alam sebagai bagian sumber pendapatan daerah, minimnya sumber daya manusia yang terampil, terbatasnya modal dan beragamnya potensisumberdaya yang dimiliki adalah kendala yang menjadi hambatan dalam pembangunanpertumbuhan ekonomi kabupaten Aceh Barat, maka diperlukan suatu kajian agar potensi dan keunggulan yang dimiliki mampudikembangkan dan menjadi sumberkesejahteraan daerah kabupaten Aceh Barat.

Kabupaten Aceh Barat memiliki luas wilayah darat 2.927,95 km², wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 957,38 km² dan garis pantai sepanjang 54,84 km. Secara administratif Kabupaten Aceh Barat terbagi dalam 12 kecamatan, 36 kemukiman, dan 322 gampong. Sebanyak 192 desa diantaranya berada di dataran dan 83 desa terletak di lembah. Hanya 47 desa yang terletak di lereng. Meulaboh merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Barat. Secara geografis, Kabupaten Aceh Barat terletak antara 04° 06' - 04° 47' Lintang Utara dan 95° 52' - 96° 30' Bujur Timur. Kabupaten Aceh Barat memiliki

batas wilayah di sebelah utara adalah Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Tengah; di sebelah selatan yaitu Samudera Hindia dan Kabupaten Nagan Raya; di sebelah timur yakni Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya; serta yang membatasi sebelah barat yaitu Samudera Hindia dan Kabupaten Aceh Jaya.

Sebelum pemekaran, Kabupaten Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097,04 km² atau 1.010.466 hektare dan secara astronomi terletak pada 2°00'-5°16' Lintang Utara dan 95°10' Bujur Timur dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan kepulauan Sumatra yang membentang dari barat ke timur mulai dari kaki Gunung Geurutee (perbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat) sampai kesisi Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 Km.

Gambar 4.1
Peta kabupaten Aceh Barat

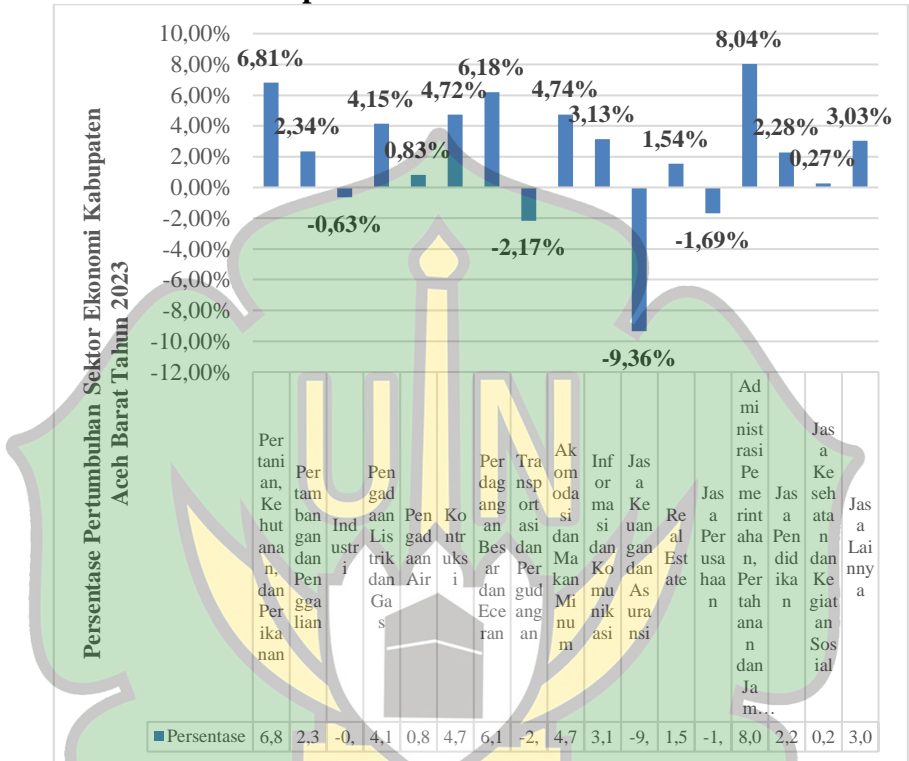


Sumber: Acehbaratkab.go.id

Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Samatiga merupakan kecamatan yang memiliki kemukiman terbanyak yaitu 6 (enam) mukim. Jumlah gampong (desa) terbanyak terdapat di Kecamatan Kaway XVI dan Woyla dengan masing-masing jumlah gampong sebanyak 43 gampong. Kecamatan terluas adalah Sungai Mas yang menempati 26,70% wilayah Aceh Barat. Daerah ini sebagian besar masih berupa hutan, sedangkan kecamatan terkecil adalah Johan Pahlawan yang merupakan ibukota Kabupaten Aceh Barat. Luas kecamatan ini hanya 44,91 Km² atau hanya 2% dari luas Kabupaten Aceh Barat. Jika melihat dari luas wilayah per kecamatan, maka terdapat tiga kecamatan terluas yaitu Kecamatan Sungai Mas (26%), Kecamatan Kaway XVI (17%) dan Kecamatan Pante Ceureumen (17%). Selain itu, di tiga kecamatan tersebut masih banyak terdapat lahan tidur yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Untuk sektor ekonomi yang di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Gambar Grafik Sebagaimana berikut:

Gambar 4.2
Grafik Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi di
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat (2024)

Gambar 4.2 di atas menunjukkan persentase laju pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Aceh Barat menunjukkan variasi yang signifikan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 6,81%, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran (6,18%) dan akomodasi serta makan minum (4,74%). Sektor konstruksi dan pengadaan listrik serta gas juga mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 4,72% dan 4,15%. Sebaliknya, sektor industri (-0,63%) dan transportasi

serta perdagangan (-2,17%) mengalami penurunan. Sektor jasa keuangan dan asuransi mengalami penurunan signifikan sebesar 9,36%, sementara sektor jasa perusahaan turun sebesar 1,69%. Sektor informasi dan komunikasi serta real estate tumbuh masing-masing 3,13% dan 1,54%, sedangkan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,04%. Sektor jasa pendidikan dan kesehatan juga menunjukkan pertumbuhan positif meskipun kecil, masing-masing 2,28% dan 0,27%. Data ini mencerminkan kemajuan di beberapa sektor dan tantangan di sektor lainnya di Kabupaten Aceh Barat.

4.2. Hasil Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis *location quotient* dan *shift share* dengan tujuan untuk menentukan sektor mana yang menjadi sektor unggulan serta sektor mana yang memiliki daya saing, selain itu juga sebagai pembandingan pertumbuhan antara satu sektor dan sektor lainnya di Kabupaten Aceh Barat.

4.2.1. Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ)

Pendekatan *location quotient* (LQ) merupakan langkah awal dalam mengetahui sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan wilayah dengan menentukan model ekonomi basis. Analisis ini bertujuan untuk melihat besarnya perbandingan peran sebuah sektor dalam pada tingkat Kabupaten Aceh Barat dengan perbandingan dengan tingkat Provinsi Aceh. Nilai LQ merupakan indikator yang

menentukan potensi perkembangan sektor pada masa yang akan datang, karena untuk yang mampu memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri dan daerah lain tergantung dari perkembangan sektor potensialnya. Sektor ekonomi yang memiliki nilai koefisien LQ > 1. Berdasarkan nilai tambah ekonomi dalam PDRB Kabupaten Aceh Barat dan PDRB Provinsi Aceh selama periode 2018-2022 diperoleh hasil perhitungan LQ seperti pada tabel berikut.

Kriteria sektor unggulan akan sangat bervariasi. Hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah, diantaranya: pertama, sektor unggulan mempunyai laju pertumbuhan yang tinggi; kedua, sektor tersebut memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar; ketiga, sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang; keempat, dapat juga diartikan sebagai sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi. Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan masa otonomi daerah saat ini, dimana daerah mempunyai kesempatan dan hak untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerahnya untuk mempercepat proses pembangunan demi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.1
Hasil Perhitungan *LQ* dengan Sektor Basis dan Non Basis
Tahun 2018-2022

Sektor Ekonomi	Nilai <i>LQ</i> (Location Quotien) / Tahun					Rata-Rata	Kategori
	2018	2019	2020	2021	2022		
Pertambangan dan Penggalian	2,33	1,82	1,83	2,84	3,08	2,38	Basis
Konstruksi	1,18	1,09	1,14	1,05	0,91	1,07	Basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,10	0,99	1,09	0,95	0,85	1,00	Basis
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,02	0,94	1,06	0,97	0,89	0,97	Non Basis
Industri Pengolahan	0,37	0,35	0,39	0,40	0,36	0,37	Non Basis
Pengadaan Listrik dan Gas	0,95	0,86	0,97	0,89	0,76	0,89	Non Basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,63	0,55	0,66	0,56	0,44	0,57	Non Basis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,01	0,94	1,09	0,98	0,86	0,98	Non Basis
Transportasi dan Pergudangan	0,78	0,73	0,85	0,71	0,64	0,74	Non Basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,78	0,71	0,78	0,76	0,61	0,73	Non Basis
Informasi dan Komunikasi	0,91	0,81	0,89	0,81	0,70	0,83	Non Basis
<i>Real Estate</i>	0,70	0,64	0,71	0,65	0,54	0,65	Non Basis
Jasa Perusahaan	0,64	0,59	0,64	0,57	0,47	0,58	Non Basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,91	0,83	0,91	0,80	0,70	0,83	Non Basis
Jasa Pendidikan	0,78	0,71	0,76	0,68	0,59	0,70	Non Basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,97	0,87	0,95	0,84	0,74	0,87	Non Basis
Jasa lainnya	0,40	0,37	0,40	0,37	0,31	0,37	Non Basis

Sumber: BPSAceh Barat, tahun 2018-2022 (Data diolah).

a. Sektor Basis ($LQ > 1$)

Berdasarkan hasil perhitungan *location quotient* Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada tabel 4.2 dari awal 2018-2022 hanya terdapat 3 sektor yang menjadi sektor unggulan atau disebut dengan sektor basis. 3 sektor tersebut adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi dan sektor jasa keuangan dan asuransi. Untuk sektor yang memiliki nilai paling unggul yaitu sebesar 2,38 dan diikuti yang ke 2 sektor konstruksi yaitu sebesar 1,07, dan terakhir yaitu sektor jasa keuangan dan asuransi yaitu sebesar 1,00. Kabupaten Aceh Barat merupakan daerah yang memiliki banyak tempat pertambangan dan penggalian, hal ini dikarena Aceh Barat memiliki luas daratan sebesar 2.783 km², yang mana daerah daratan tersebut memiliki potensi dalam sektor pertambangan dan penggalian. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan ini antara lain, minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, perak dan bijih mangan. Hal ini dapat dilihat banyaknya masyarakat yang bekerja pada sektor pertambang dan penggalian sehingga membuat sektor ini menjadi sektor basis dengan nilai LQ 1,51.

Daerah Aceh Barat memiliki banyak pertambangan, salah satu diantaranya PT Mifa Bersaudara (“MIFA” atau “Perseroan”) merupakan salah satu entitas anak PT Media Djaya Bersama yang

didirikan pada tahun 2002. Sejak awal pendirian sampai dengan saat ini, MIFA menjalankan kegiatan operasi pertambangan batu bara yang terintegrasi di wilayah Aceh Barat, Provinsi Aceh. Kegiatan pertambangan MIFA sudah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) berdasarkan keputusan Bupati Aceh Barat No. 117.b tahun 2011 Tentang Penyesuaian Izin Usaha (IUP) Operasi Produksi PT Mifa Bersaudara dengan luas wilayah konsesi sekitar 3.134 hektar (ha) dan telah memiliki Sertifikat Clean and Clear (CnC) No. 234/Bb/03/2014.

Sesuai data yang dimiliki Walhi Aceh per November 2017 bahwa jumlah perusahaan pertambangan yang memiliki izin dan beroperasi di Aceh Barat sebanyak 8 (delapan) perusahaan, terdiri dari PT. Magellanic Garuda Kencana, Koperasi Putra Putri Aceh, PT. Agrabudi Jasa Bersama, PT. Agrabudi Jasa Bersama, PT. Mifa Bersaudara, PT. Prima Bara Mahadana, PT. Bara Adhipratama, PT. Indonesia Pacific Energy, dan PT. Nirmala Coal Nusantara. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan aktifitas pertambangan pada 2 (dua) komoditas, yakni emas dan batu bara. PT. Magellanic Garuda Kencana dan Koperasi Putra Putri Aceh mempunyai izin pertambangan emas sedangkan 6 (enam) perusahaan lainnya pada komoditas batu bara. Setiap perusahaan mempunyai luas area yang berbeda, dengan total area pertambangan di Aceh Barat 21.664 Ha.

Namun, tidak semua perusahaan tersebut aktif melakukan aktivitas pertambangan. Diantara perusahaan pertambangan yang aktif melakukan aktivitasnya yaitu PT. Mifa Bersaudara, dengan luas

area 3.134 Ha yang berada di Kecamatan Meureubo, dan PT. Prima Bara Mahadana (PT. PBM), di Gampong Batu Jaya, Kecamatan Kaway XVI, luas areanya diperkirakan mencapai 600 Ha. Selain itu, berdasarkan Walhi Aceh bahwa terdapat pula pertambangan emas ilegal berada di Aceh Barat, yakni di kawasan Sungai Mas dan Woyla Timur. Pola pertambangan dilakukan dengan menggunakan alat berat (beko) (Masrizal Bin Zairi, 2021).

Sektor kontruksi pada analisis LQ termasuk kedalam sektor basis dengan nilai 1,07 hal ini menunjukkan bahwa kontruksi yang ada daerah Aceh Barat menunjukkan kemajuannya. Diketahui dalam Qanun Aceh Barat sudah merancang pembangunan untuk menuju Aceh lebih baik. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017 – 2022 yang dituangkan didalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor Tahun 2018 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 – 2022, yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahunan, dan penjabaran dari visi, misi dan daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Barat serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh dan Nasional. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Proses yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Barat dalam kurun lima tahun terakhir memiliki kemajuan yang pesat dilihat dari

angka nilai LQ sektor konstruksi bernilai basis yang menandakan bahwa ada pengaruh sektor konstruksi pada provinsi Aceh sendiri. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi yang dapat berlangsung secara berkesinambungan dalam suatu kurun waktu tertentu dapat mengubah struktur ekonomi. Keadaan ekonomi di daerah manapun umumnya mengalami pertumbuhan baik secara alamiah maupun pengaruh dari kebijakan ekonomi. Perubahan struktur (transformasi struktural) atas pola perekonomian suatu daerah adalah perubahan dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern. Sektor konstruksi sudah sangat berkembang dengan baik di Aceh Barat sehingga dalam proses pembangunan daerah selain mempertimbangkan pertumbuhan dan pemerataan, juga dampak aktivitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Lebih jauh, dalam pelaksanaan pembangunan seharusnya dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian kepada arah yang lebih baik.

Sektor jasa keuangan dan asuransi Kabupaten Aceh Barat pada lima tahun terakhir ini menunjukkan hasil yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi meningkat juga didukung oleh perkembangan perbankan di kabupaten Aceh Barat yang cukup baik. Perkembangan perbankan juga dapat dilihat dari infrastruktur fisik yaitu jumlah bank dan jumlah kantor cabang yang didirikan di daerah-daerah dan juga jumlah dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh Bank di kabupaten Aceh Barat. Seperti contohnya di salah satu kecamatan yang masih mendapatkan dana bergulir dari

Unit Pengelola Kegiatan adalah Kecamatan Meureubo, dimana kecamatan ini memiliki 26 desa. Adanya perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat miskin melalui akses jasa keuangan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi.

Akses perbankan yang mudah bagi kelompok masyarakat miskin ini dapat meningkatkan efisiensi alokasi modal, yang dapat mempercepat pertumbuhan agregat, dan mengurangi hambatan dalam akses kredit produktif, yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat miskin sehingga dapat mengentaskan dari kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin secara tidak langsung dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Perekonomian kabupaten Aceh Barat yang semakin berkembang yang dapat dilihat dari trend pertumbuhan ekonomi yang tumbuh walaupun pada tahun-tahun terakhir mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Aceh Barat yang semakin baik ternyata belum dapat mensejahterakan masyarakatnya, dimana kemiskinan masih menjadi persoalan dalam perekonomian Kabupaten Aceh Barat dengan tingkat kemiskinan 39.290 jiwa penduduk miskin. Terlebih lagi pertumbuhan ekonomi belum kabupaten Aceh Barat belum dinikmati oleh semua lapisan masyarakat karena ketimpangan merupakan masalah ekonomi-sosial yang masih menjadi persoalan yang belum diselesaikan.

b. Sektor Non Basis ($LQ < 1$)

Berdasarkan hasil perhitungan indeks LQ yang disajikan pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa terdapat 14 (empat belas) sektor non basis di Kabupaten Aceh Barat yaitu diantaranya, Pertanian kehutanan dan perikanan; Industri pengolahan; Pengadaan listrik dan gas; Pengadaan air; pengelolaan sampah; limbah dan daur ulang; Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; Transportasi dan pergudangan; Penyediaan akomodasi makan dan minum; Informasi dan komunikasi; *Real estate*; Jasa perusahaan; Administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib; Jasa Pendidikan; Jasa kesehatan dan kegiatan social dan Jasa lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pada sektor tersebut di Kabupaten Aceh Barat belum mampu memenuhi sendiri kebutuhannya dan dimungkinkan untuk mengimpor dari luar daerah.

Sektor Industri Pengolahan dan merupakan sektor dengan nilai LQ terkecil, hal ini terjadi karena di sektor pengelolaan industri Kabupaten Aceh Barat masih dalam tahap pembenahan untuk pengembangan sektor industri, khususnya industri kecil atau industri rumah tangga yang didominasi oleh industri kerajinan tangan, produk makanan dan minuman, jasa dan material bangunan. Jenis industri yang berkembang di Kabupaten Aceh Barat masih berorientasi pada kebutuhan lokal sehingga sebagian besar industri yang beroperasi masih menggunakan cara-cara tradisional. Bila dilihat menurut jenis barang yang dihasilkan, industri dapat dikelompokkan menjadi industri tradisional.

Kriteria sektor unggulan akan sangat bervariasi. Hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah, diantaranya: pertama, sektor unggulan mempunyai laju pertumbuhan yang tinggi; kedua, sektor tersebut memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar; ketiga, sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang; keempat, dapat juga diartikan sebagai sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi. Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan masa otonomi daerah saat ini, dimana daerah mempunyai kesempatan dan hak untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerahnya untuk mempercepat proses pembangunan demi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

4.2.2. Hasil Analisis *Shift Share*

Analisis *Shift Share* merupakan metode analisis untuk mengetahui struktur perekonomian pada suatu wilayah, pergeseran sektor-sektor unggulan pada dua kurun waktu, dan mengetahui posisi sektor perekonomian suatu wilayah terhadap wilayah yang lebih luas. Pada penelitian ini diperoleh data kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dan data diperoleh dari kantor BPS dan dari wibesite resmi BPS. Uji sampel diambil pada area Aceh Barat dan data Provinsi Aceh sebagai pembanding yang lebih luas. Dalam penelitian ini analisis *shift share* dilakukan dengan

menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang terdiri atas 3 komponen analisa, yaitu:

Tabel 4.2
Perhitungan *National Share*, *Proportional share* dan *Differential shift*

Sektor Ekonomi	<i>National share</i>	<i>Proportional share</i>	<i>Differential shift</i>	Total
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	834,998	287,176	342,962	1465,136
Pertambangan dan Penggalian	320,635	551,840	1670,220	2542,695
Industri Pengolahan	52,991	18,004	47,670	118,666
Pengadaan Listrik dan Gas	3,524	0,482	0,164	4,170
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulangt	0,752	0,301	-0,329	0,724
Konstruksi	306,044	92,727	-15,128	383,643
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	438,870	83,427	141,910	664,206
Transportasi dan Pergudangan	142,815	16,191	19,683	178,688
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	34,443	14,751	-0,948	48,247
Informasi dan Komunikasi	70,838	28,658	-3,116	96,379
Jasa Keuangan dan Asuransi	59,882	10,820	-4,360	66,342
<i>Real Estate</i>	81,195	19,852	-3,430	97,618
Jasa Perusahaan	11,203	4,016	-2,694	12,525
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	253,289	48,032	-9,423	291,898
Jasa Pendidikan	57,948	21,547	-8,272	71,223
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	70,376	46,294	-9,631	107,040
Jasa lainnya	15,243	5,520	-0,473	20,290
PDRB	2755,045	1249,637	2164,806	6169,488

Sumber: BPS Aceh Barat, tahun 2018-2022 (data diolah)

1) *National Share* merupakan suatu metode untuk mengetahui pergeseran struktur perekonomian suatu daerah yang dipengaruhi oleh pergeseran perekonomian nasional. Hasil perhitungan menggambarkan seberapa besar peran wilayah nasional mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah regional yang diamati (kab/kota). Dilihat dari tabel 4.2 pada nilai *National Share* semua angka menunjukkan nilai positif di semua sub sektor ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di tingkat Provinsi Aceh positif, akan memberikan dampak pertumbuhan yang positif juga bagi sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Ini merupakan suatu dampak yang positif yang diberikan oleh kebijakan ekonomi Provinsi Aceh yang mampu mempengaruhi sektor perekonomian dalam suatu wilayah. Sektor ekonomi yang mendapat dampak terbesar dari pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu sebesar 834,998 karena mayoritas penghasilan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat masih bergantung pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan. Sedangkan sektor yang paling terkecil terdapat di sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu hanya 0,7521 dengan demikian, untuk memacu pertumbuhan ekonomi regional Kabupaten Aceh Barat, pemerintah daerah setempat harus mampu memantik sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

untuk dapat berkembang lebih besar dari sekarang. Tidak hanya itu, perlu adanya juga peningkatan dari sektor-sektor lain seperti sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor jasa perusahaan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh suatu daerah, khususnya pembangunan dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang disajikan secara berskala setiap tahunnya, pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan agregat dari pertumbuhan di setiap sektor ekonomi yang ada. Bagi setiap daerah, indikator ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, serta berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang.

- 2) *proportional shift* merupakan suatu metode yang bertujuan mengukur aktivitas ekonomi pada sektor tersebut apakah tumbuh lebih cepat atau lebih lambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi secara provinsi atau nasional. Berdasarkan analisis *Proportional Share* diketahui bahwa semua sektor bernilai positif. Hal ini menunjukkan terjadinya pertumbuhan lebih cepat dan sektor tersebut berkembang di provinsi Aceh. Sektor yang memiliki nilai lebih tinggi yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 551,839. Hal ini dapat dilihat bahwa pertambangan dan penggalian di Aceh Barat pertumbuhannya lebih cepat dan

sektor tersebut dapat berkembang di Provinsi Aceh. Oleh karena itu lebih cepat sehingga pertumbuhannya di tingkat Provinsi Aceh sangat bagus, serta mengalami kenaikan dan memiliki sinkronisasi yang erat dengan kegiatan sektoral di Provinsi Aceh, seperti dalam hal permintaan produk bahan alam, ketersediaan bahan mentah, struktur pasar serta permintaan penawaran barang dan jasa cukup berkembang dan ekspor dan import yang begitu berjalan dengan baik, sesuai dengan permintaan konsumen. Sedangkan sektor yang memiliki nilai paling rendah yaitu Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan nilai sebesar 0,301. Pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhannya di tingkat Provinsi Aceh, serta mengalami penurunan dan masih memiliki sinkronisasi yang erat dengan kegiatan sektoral di Provinsi Aceh, tetapi dengan nilai angka yang cukup kecil oleh sebab itu perlu adanya kontribusi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatnya kesadaran tentang pengelolaan air bersih dan sampah, baik sampah limbah perusahaan tambang maupun limbah rumahan.

- 3) *Differential Shift* merupakan indikator yang memberikan penjelasan dalam menentukan seberapa jauh daya saing sektor ekonomi daerah (Aceh Barat) dengan sector perekonomian di provinsi (Aceh). *Differential shift* dapat menjelaskan seberapa besar perubahani dalam sector ekonomi tertentu yang disebabkan oleh beberapa keunggulan kompetitif atau daya

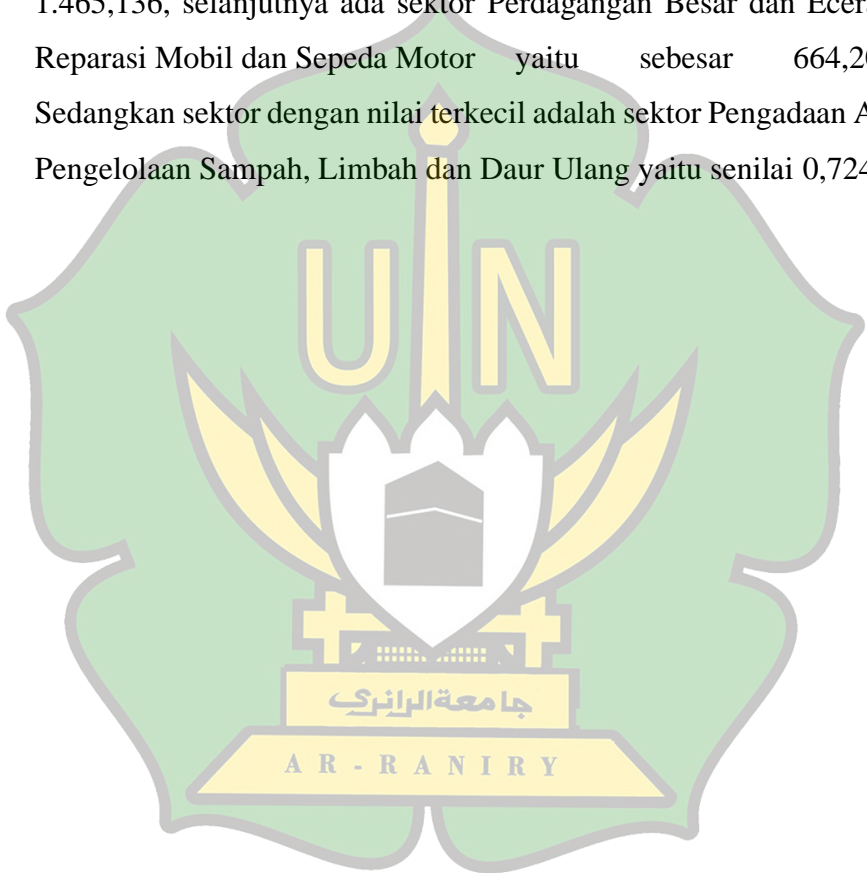
saing unik yang dimiliki oleh daerah yang diteliti dalam hal ini Kabupaten Aceh Barat. *Differential Shift* menunjukkan kemampuan atau daya saing suatu sektor di regional (Aceh Barat) terhadap sektor yang sama pada skala provinsi (Aceh) tersebut merupakan jantungnya kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor ke daerah yang bersangkutan nilai *differential shift* total adalah 2.164,806 terdapat 6 sektor yang tumbuh positif atau yang memiliki daya saing yang kuat, diantaranya adalah sektor: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Transportasi dan Pergudangan. Sektor yang mengalami daya saing yang negatif diantaranya adalah: sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, *Real Estate*, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa lainnya. Sektor pada uji *differential shift* yang memiliki nilai tertinggi terdapat pada sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 1.670,22. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki daya saing yang sangat baik, yang dipengaruhi oleh bertambah banyaknya perusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten Aceh Barat.

Di Kabupaten Aceh Barat tingkat pertambangan dan penggalian semakin meningkat dengan adanya permintaan konsumen baik dalam negeri maupun luar negeri, serta tinggal SDA yang berlimpah. Sedangkan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mempunyai nilai negatif sebesar -0,329 artinya sektor tersebut kurang baik karena tidak bisa bersaing dengan Kabupaten yang ada diluar Kabupaten Aceh Barat karena tidak bisa mengelolah pengadaan air serta sampah yang ada didalam Kabupaten Aceh Barat.

Nilai komponen *differential shift* memiliki tanda yang positif, ini mengindikasikan bahwa keunggulan kompetitif perekonomian Kabupaten Aceh Barat memiliki hasil yang akan membantu pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Aceh Barat. Untuk menjadikan semua sektor yang ada di Kabupaten Aceh Barat berdaya saing tinggi, maka segenap masyarakat, pemerintah maupun pihak swasta harus sama-sama membangun dan mengembangkan sektor-sektor yang belum berdaya saing tinggi tersebut.

Kesimpulan yang didapat dari seluruh penjumlahan komponen *shift share* ialah semua sektor memiliki nilai yang positif, dengan total nilai *shift share* sebesar 6.169,488. Hal tersebut berarti sektor-sektor yang ada di Kabupaten Aceh Barat secara keseluruhan tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor-sektor yang ada di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, sektor-sektor tersebut berpeluang meningkatkan nilai tambah perekonomian di Kabupaten Aceh Barat. peningkatan ini disumbangkan oleh semua sektor ekonomi yang ada

di Kabupaten Aceh Barat sektor yang menyumbangkan kontribusi terbesar kepada pertumbuhan Kabupaten Aceh Barat adalah sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 2.542,695, disusul oleh sektor Peratanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 1.465,136, selanjutnya ada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 664,206. Sedangkan sektor dengan nilai terkecil adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu senilai 0,724.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ), sektor basis (Unggulan) dan non basis (non unggulan) di Kabupaten Aceh Barat adalah:
 - a. Sektor basis meliputi sektor pertambangan dan penggalan, kontruksi, dan jasa keuangan dan asuransi.
 - b. Sektor non basis meliputi sector sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan dau ulang; sektor perdagangan besar dan eceran; serta sektor transportasi dan pergudangan, sektor industri pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor kontruksi; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor *real estate*; sektor jasa perusahaan; sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta sektor jasa lainnya.
2. Berdasarkan hasil analisis *shift share* secara agregat terjadi penambahan tingkat *output* (*national share*) ekonomi selama tahun 2018-2022 sebesar Rp 6.169,488 disebabkan oleh efek pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi, pengaruh dari bauran industri/sektoral (*Proportional Share*) terhadap

pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh bernilai negatif. Secara keseluruhan sektor-sektor perekonomian Kabupaten Aceh Barat masih banyak memiliki daya saing atau kemandirian daerah seperti sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor jasa lainnya dan jasa perusahaan.

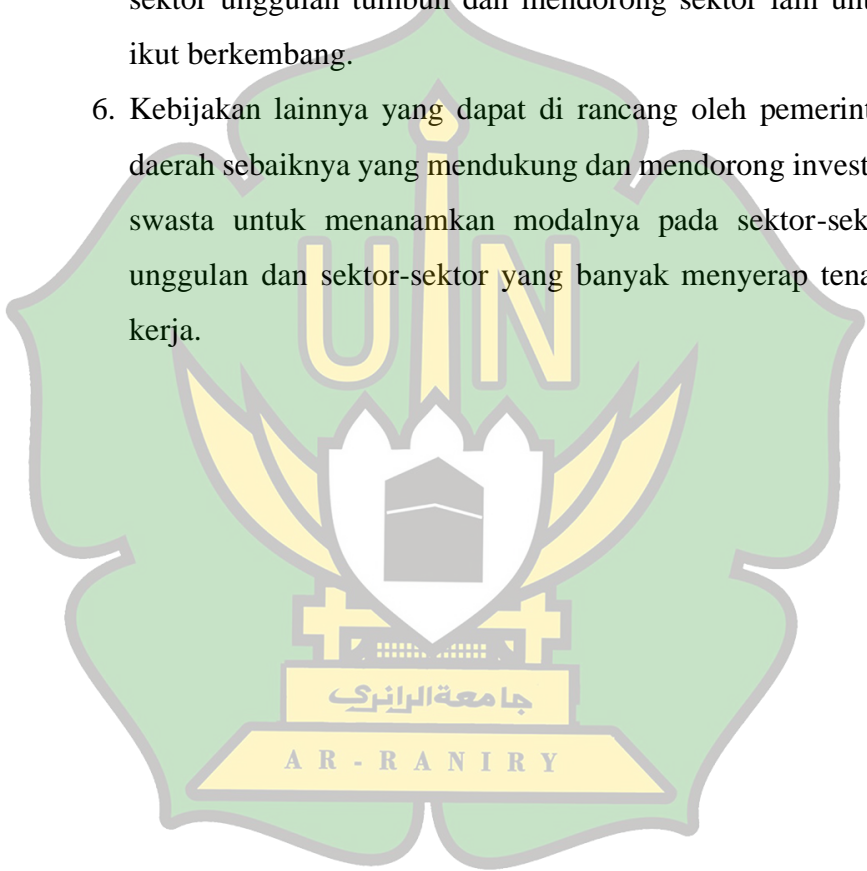
5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, disarankan :

1. Sektor ekonomi di Kabupaten Aceh Barat harus dikembangkan melalui strategi pembangunan ekonomi yang tepat, sehingga potensi ekonomi di Kabupaten Aceh Barat dapat tumbuh dan memberi kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat.
2. Dalam upaya mempercepat proses pertumbuhan ekonomi yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat menjadikan sektor-sektor unggulan sebagai prioritas agar dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.
3. Dalam memacu perekonomian Kabupaten Aceh Barat, pemerintah daerah sebaiknya fokus pada sektor-sektor unggulan terutama sektor-sektor dengan penyumbang *multiplier* terbesar dan banyak menyerap tenaga kerja.
4. Pemerintah Kabupaten Aceh barat perlu menetapkan kebijakan pembangunan dengan prioritas sektor unggulan

atau basis dengan tetap memperhatikan sektor non basis secara proporsional.

5. Anggaran untuk sektor-sektor unggulan perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan sektor unggulan, sehingga sektor unggulan tumbuh dan mendorong sektor lain untuk ikut berkembang.
6. Kebijakan lainnya yang dapat di rancang oleh pemerintah daerah sebaiknya yang mendukung dan mendorong investasi swasta untuk menanamkan modalnya pada sektor-sektor unggulan dan sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.



DAFTAR PUSTAKA

- Acehbaratkab.go.id. (2023). Sejarah Kabupaten Barat. Diakses pada tanggal 07 Desember 2023 pada situs <https://acehbaratkab.go.id/halaman/selayang-pandang>.
- Acehbaratkab.go.id. (2023). Geografis Kabupaten Aceh Barat. Diakses pada tanggal 7 Desember 2023 pada situs <https://acehbaratdayakab.go.id/halaman/demografis>.
- Amalia, F. (2022). *Ekonomi Pembangunan*, Bandung: CV. Widina Media Utama.
- Arsyad, L. (2002). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Hailudin, H., Daeng, A., Nasir, M., Bakar, A. A., & Suriadi, I. (2023). Potensi Sektor Unggulan Serta Kontribusinya Dalam Menciptakan Kesempatan Kerja Di Kabupaten Lombok Barat. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 59–73.
- BPS Provinsi Aceh. (2021). *Provinsi Aceh Dalam Angka Berbagai Edisi 2021: PBDR Se-Kabupaten / Kota Provinsi Aceh*. Banda. Aceh: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.
- BPS Provinsi Aceh. (2021). *PDBR ADHK Kabupaten Aceh Barat*. Banda. Aceh: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat.
- Adyatama, MR. (2018), “*Analisis Struktur Ekonomi dan Sektor Basis di Kota Palu Tahun 2012-2016*”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Dipublikasikan.
- Darmawan, D. (2018). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Surabaya: Revka Petra Media.
- David, Y. B., Engka, S. M. D., dan Sumual, J. I. S. (2019). Pengaruh Angkatan Kerja Bekerja dan Jumlah Penduduk Terhadap

Pengangguran Di Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 7(8), 3389–3397.

Suaib, H. (2017). *Suku Moi: Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Tangerang: AnImage.

Hakim, A. R., Adhisti, M., Khoirudin, R., & Sukarniati, L. (2017). Perubahan Struktur Ekonomi Dan Kesempatan Kerja Di Indonesia (Analisa Input Output), Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya Ii (Knpmp Ii), Issn: 2502-6526.

Hakim, A. R., Adhisti, M., Khoirudin, R., & Sukarniati, L. (2017). Sektor Tersier dan Kesempatan Kerja di Indonesia (Analisa Input Output). Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya Ii (Knpmp Ii), Issn: 2502-6526.

Hakim, A. R., Setiawan, R. R., & Nasir, M. S. (2017). *Perubahan Struktur Ekonomi dan Kesempatan Kerja Di Indonesia (Analisa Input Output)*, Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya Ii (Knpmp Ii), Issn: 2502-6526.

Herawaty, R. and Bangun, B. (2018) Analysis of Potential Economic sector In Development Of Kabupaten Karo, *JKBM: Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen*, 5(1), 39–52.

Hertantingsih, Y. (2015). Analisis Pusat Pertumbuhan Kawasan Andalan. *JEBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia*, 10(02), 44–65. <https://doi.org/10.36310/jebi.v10i02.50>.

Hidayat, M., & Darwin, R. (2017). Analisis Sektor Unggulan dalam pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. *Media Trend*, 12(2), 156. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v12i2.3081>

Ibrahim, I. (2018). Analisis Potensi Sektor Ekonomi Dalam Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Empiris Pada

- Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2012-2016). *Gorontalo Development Review*, 1(1), 44.
- Halid, A., Abdul, I., Wolok, T. (2023). *Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Daya Saing Sektor Unggulan*, Gorontalo: *Ideas Publishing*.
- Indra, Zulfi Laili. (2019). Analisis Sektor Unggulan dan Perubahan Struktur Perekonomian Kabupaten Jombang Tahun 2013-2017.
- Maghfiroh, A. (2021). Pola Pertumbuhan Perekonomian melalui Sektor Unggulan Daerah Kabupaten Jombang. *Journal of Economic Management Accounting and Technology*, 4(2), 119–129.
- Kosuma, S., Palar, S. W., & Lopian, A. L. C. P. (2016). Analisis Struktur Perekonomian dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Ternate. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(02), 507–516.
- Krisnawati, E. (2021, Januari 7). Mengenal teori-teori pertumbuhan ekonomi & daftar tokoh pemikirnya. Diambil kembali dari Tirto: <https://tirto.id/mengenal-teoriteori-pertumbuhan-ekonomi-daftar-tokoh-pemikirnya-f8Un>
- Kristriantono, P., & Yulawati, Y. (2022). Dampak Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 18(2), 141-158.
- Maghfironi, N. Y., Puspitaningrum, D. A., & Hamidah, S. (2023). Analisis Sektor Unggulan Di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 7(3), 1009-1021.
- Mahsunah, D. (2013). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3), 12-14.

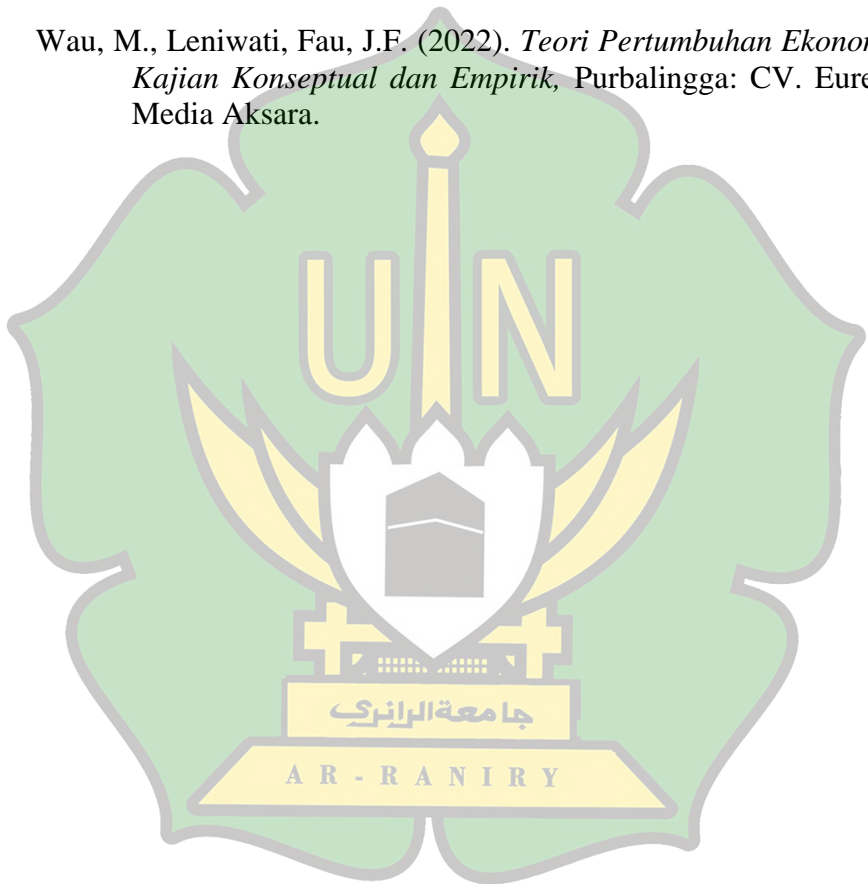
- Nurlina, N., Andiny, P., & Sari, M. (2019). Analisis Sektor Unggulan Aceh Bagian Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 23–37.
- Palindangan, J., & Bakar, A. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dIndeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, dan Inovasi)*, 5(1), 65-80.
- Parera, Jolyne Myrell. (2018) . “Analisis Tipologi Klassen dan Penentu Sektor Unggulan Di Kota AMBON-Provinsi Maluku.” XII: 51– 71.
- Pertiwi, N. (2017). *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*, Purwakarta: Pustaka Ramadhan..
- Pratiwi, N. P. A., & Indrajaya, I. G. B. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *Buletin*.
- Pratiwi, N. P. A., & Indrajaya, I. G. B. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *Buletin Studi Ekonomi*, 220. <https://doi.org/10.24843/bse.2019.v24.i02.p05>
- Purnamasari, H. (2018). Analisis Perubahan Struktur Perekonomian dan Penentu Sektor Unggulan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016. (Skripsi S-1 Fakultas Jurusan Studi Ekonomi dan Pembangunan), Jawa Timur: Universitas Jember.
- Rachibini., & Didik. J. (2001). *Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rajab, A., & Rusli, R. (2019). Penentuan sektor-sektor unggulan yang ada pada Kabupaten Takalar melalui Analisis Tipologi

- Klassen. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 16-38.
- Rahmawati, E., Purতো, R.S., & Yunitasari, D. (2022). Analisis Sektor - Sektor Ekonomi Unggulan dan Strategi Pengembangannya: Studi Kasus di Kabupaten Lumajang, *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 895-904.
- Safwadi, I., & Rangkuti, M. S. (2018). Analisis Struktur Ekonomi dan Sektor Unggulan Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 2(1), 39-48. ISSN: ISSN 2548-9585 (Online).
- Subandi. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. ke-4. Bandung: ALFABETA,CV.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukma, (2014). Hubungan Pengetahuan dan Sikap dalam Memilih Makanan Jajanan dengan Obesitas pada Remaja di SMPN 2 Brebes. *Artikel Penelitian*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Tarigan, Robinson. (2005). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widayati, T., G.S, Nugroho A.D., Rahayu, S., Boari, Y., Syamil, A., ... & Suryahani, I. (2023). *Perekonomian Indonesia: Perkembangan & Transformasi Perekonomian Indonesia Abad 21 Terkini*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Woluyo, Andik. (2018). *Analisis Potensi Ekonomi dan Sektor Unggulan Ekonomi di Kabupaten Gorontalo*. Surakarta:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Zakaria, Z., Zulham, T., & Gunawan, E. (2018). Analisis Struktur Ekonomi Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Journal of Economic Perspec*, 4(1), 44-55.

Wau, M., Leniwati, Fau, J.F. (2022). *Teori Pertumbuhan Ekonomi: Kajian Konseptual dan Empirik*, Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.



Lampiran 1.

Data PDRB Kabupaten Aceh Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2018-2022

Sektor Ekonomi	PDRB Aceh Barat				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2331,44	2448,65	2650,82	2923,02	3476,24
Pertambangan dan Penggalian	895,26	771,76	662,3	1892,88	4106,3
Industri Pengolahan	147,96	146,28	143,06	201,81	245,9
Pengadaan Listrik dan Gas	9,84	10,42	10,76	10,94	11,35
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulangt	2,1	2,5	2,64	2,6	2,61
Konstruksi	854,52	919,95	983,61	1038,69	1098,3
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1225,39	1279,24	1309,8	1401,55	1600,24
Transportasi dan Pergudangan	398,76	414,22	315,76	363,67	463,65
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	96,17	106,43	101,16	103,8	136,41
Informasi dan Komunikasi	197,79	204,34	225,95	243,04	274,69
Jasa Keuangan dan Asuransi	167,2	185,93	186,1	182,16	193,05
<i>Real Estate</i>	226,71	244,28	246,71	263,36	278,71
Jasa Perusahaan	31,28	33,78	32,86	33,67	39,8
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	707,22	747,73	757,2	828,99	831,91
Jasa Pendidikan	161,8	186,64	193,76	203,07	213,69
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	196,5	215,68	237,96	262,75	316,13
Jasa lainnya	42,56	46,55	48,76	51,12	57,5
Total	7692,48	7964,35	8109,23	10007,11	13346,48

Lampiran 2.

Data PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2018-2022

Sektor Ekonomi	PDRB Provinsi Aceh				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	46.365,3 8	48.438,8 6	51.547,8 8	55.611,3 2	62.311,5 4
Pertambangan dan Penggalian	7.777,32	7.900,31	7.416,19	12.305,3 4	21.162,7 6
Industri Pengolahan	8.117,10	7.777	7.592,98	9.314,18	10.874,8 9
Pengadaan Listrik dan Gas	209,52	225,88	227,46	227,79	238,19
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	67,67	84,24	82,25	85,39	94,71
Konstruksi	14.622,7 8	15.789,- 9	17.757,3 8	18.307,6 0	19.053,2 8
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24.671,4 5	25.468,9 6	24.603,4 2	26.460,6 1	29.361,3 6
Transportasi dan Pergudangan	10.326,8 9	10.589,8 6	7.648,94	9.489,89	11.497,6 4
Penyedia Akomodasi & Makan Minum	2.502,67	2.775,75	2.646,62	2.527,32	3.574,51
Informasi dan Komunikasi	4.416,08	4.671,64	5.189,85	5.566,52	6.202,61
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.067,89	3.506,34	3.510,64	3.527,52	3.622,21
Real Estat	6.534,11	7.159,28	7.165,32	7.525,77	8.131,68
Jasa Perusahaan	988,52	1.065,14	1.058,26	1.099,77	1.342,92
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15.764,9 7	16.831,1 9	17.076,1 5	19.049,0 9	18.754,5 4
Jasa Pendidikan	4.211,13	4.899,92	5.245,24	5.507,88	5.776,94
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.102,49	4.618,44	5.136,31	5.795,76	6.801,17
Jasa Lainnya	2.165,02	2.360,19	2.474,46	2.574,55	2.949,08
Total	155.910, 99	148.373, 00	166.379, 35	184.976, 30	211.750, 03

Lampiran 3

Hasil Analisis *Location Quotient* Tahun 2018

Sektor Ekonomi	PDRB Aceh Barat	Total PDRB Aceh Barat	PDR B Provinsi Aceh	Total PDRB Provinsi Aceh	LQ 2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2331,44	7692,48	46,365,38	155.910,99	1,02
Pertambangan dan Penggalian	895,26	7692,48	7777,32	155.910,99	2,33
Industri Pengolahan	147,96	7692,48	8117,1	155.910,99	0,37
Pengadaan Listrik dan Gas	9,84	7692,48	209,52	155.910,99	0,95
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulangt	2,1	7692,48	67,67	155.910,99	0,63
Konstruksi	854,52	7692,48	14622,78	155.910,99	1,18
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1225,39	7692,48	24671,45	155.910,99	1,01
Transportasi dan Pergudangan	398,76	7692,48	10326,89	155.910,99	0,78
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	96,17	7692,48	2502,67	155.910,99	0,78
Informasi dan Komunikasi	197,79	7692,48	4416,08	155.910,99	0,91
Jasa Keuangan dan Asuransi	167,2	7692,48	3067,89	155.910,99	1,10
<i>Real Estate</i>	226,71	7692,48	6534,11	155.910,99	0,70
Jasa Perusahaan	31,28	7692,48	988,52	155.910,99	0,64
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	707,22	7692,48	15764,97	155.910,99	0,91
Jasa Pendidikan	161,8	7692,48	4211,13	155.910,99	0,78
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	196,5	7692,48	4102,49	155.910,99	0,97
Jasa lainnya	42,56	7692,48	2165,02	155.910,99	0,40

Lampiran 4

Hasil Analisis *Location Quotient* Tahun 2019

Sektor Ekonomi	PDRB Aceh Barat 2019	Total PDRB Aceh Barat	PDRB Provinsi Aceh	Total PDRB Provinsi Aceh	LQ 2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2448,65	7.964,35	48.438,86	148.373,00	0,94
Pertambangan dan Penggalian	771,76	7.964,35	7.900,31	148.373,00	1,82
Industri Pengolahan	146,28	7.964,35	7.777	148.373,00	0,35
Pengadaan Listrik dan Gas	10,42	7.964,35	225,88	148.373,00	0,86
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulangt	2,5	7.964,35	84,24	148.373,00	0,55
Konstruksi	919,95	7.964,35	15.789,90	148.373,00	1,09
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1279,24	7.964,35	25.468,96	148.373,00	0,94
Transportasi dan Pergudangan	414,22	7.964,35	10.589,86	148.373,00	0,73
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	106,43	7.964,35	2.775,75	148.373,00	0,71
Informasi dan Komunikasi	204,34	7.964,35	4.671,64	148.373,00	0,81
Jasa Keuangan dan Asuransi	185,93	7.964,35	3.506,34	148.373,00	0,99
<i>Real Estate</i>	244,28	7.964,35	7.159,28	148.373,00	0,64
Jasa Perusahaan	33,78	7.964,35	1.065,14	148.373,00	0,59
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	747,73	7.964,35	16.831,19	148.373,00	0,83
Jasa Pendidikan	186,64	7.964,35	4.899,92	148.373,00	0,71
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	215,68	7.964,35	4.618,44	148.373,00	0,87
Jasa lainnya	46,55	7.964,35	2.360,19	148.373,00	0,37

Lampiran 5

Hasil Analisis *Location Quotient* Tahun 2020

Sektor Ekonomi	PDRB Aceh Barat	Total PDRB Aceh Barat	PDR B Provinsi Aceh	Total PDRB Provinsi Aceh	LQ 2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2650,82	8109,23	51.547,88	166.379,35	1,06
Pertambangan dan Penggalian	662,3	8109,23	7.416,19	166.379,35	1,83
Industri Pengolahan	143,06	8109,23	7.592,98	166.379,35	0,39
Pengadaan Listrik dan Gas	10,76	8109,23	227,46	166.379,35	0,97
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulangt	2,64	8109,23	82,25	166.379,35	0,66
Konstruksi	983,61	8109,23	17.757,38	166.379,35	1,14
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1309,8	8109,23	24.603,42	166.379,35	1,09
Transportasi dan Pergudangan	315,76	8109,23	7.648,94	166.379,35	0,85
Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minum	101,16	8109,23	2.646,62	166.379,35	0,78
Informasi dan Komunikasi	225,95	8109,23	5.189,85	166.379,35	0,89
Jasa Keuangan dan Asuransi	186,1	8109,23	3.510,64	166.379,35	1,09
<i>Real Estate</i>	246,71	8109,23	7.165,32	166.379,35	0,71
Jasa Perusahaan	32,86	8109,23	1.058,26	166.379,35	0,64
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	757,2	8109,23	17.076,15	166.379,35	0,91
Jasa Pendidikan	193,76	8109,23	5.245,24	166.379,35	0,76
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	237,96	8109,23	5.136,31	166.379,35	0,95
Jasa lainnya	48,76	8109,23	2.474,46	166.379,35	0,40

Lampiran 6

Hasil Analisis *Location Quotient* Tahun 2021

Sektor Ekonomi	PDRB Aceh Barat	Total PDRB Aceh Barat	PDRB Provinsi Aceh	Total PDRB Provinsi Aceh	LQ 2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2923,02	10.007,11	55611,32	184.976,30	0,97
Pertambangan dan Penggalian	1892,88	10.007,11	12.305,34	184.976,30	2,84
Industri Pengolahan	201,81	10.007,11	9.314,18	184.976,30	0,40
Pengadaan Listrik dan Gas	10,94	10.007,11	227,79	184.976,30	0,89
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulangt	2,6	10.007,11	85,39	184.976,30	0,56
Konstruksi	1.038,69	10.007,11	18.307,60	184.976,30	1,05
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.401,55	10.007,11	26.460,61	184.976,30	0,98
Transportasi dan Pergudangan	363,67	10.007,11	9.489,89	184.976,30	0,71
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	103,8	10.007,11	2.527,32	184.976,30	0,76
Informasi dan Komunikasi	243,04	10.007,11	5.566,52	184.976,30	0,81
Jasa Keuangan dan Asuransi	182,16	10.007,11	3.527,52	184.976,30	0,95
<i>Real Estate</i>	263,36	10.007,11	7.525,77	184.976,30	0,65
Jasa Perusahaan	33,67	10.007,11	1.099,77	184.976,30	0,57
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	828,99	10.007,11	19.049,09	184.976,30	0,80
Jasa Pendidikan	203,07	10.007,11	5.507,88	184.976,30	0,68
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	262,75	10.007,11	5.795,76	184.976,30	0,84
Jasa lainnya	51,12	10.007,11	2.574,55	184.976,30	0,37

Lampiran 7
Hasil Analisis *Location Quotient* Tahun 2022

Sektor Ekonomi	PDRB Aceh Barat	Total Aceh Barat	PDR B Provinsi Aceh	Total PDRB Provinsi Aceh	LQ 2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3476,24	13346,48	62,311,54	211.750,03	0,89
Pertambangan dan Penggalian	4106,3	13346,48	21,162,76	211.750,03	3,08
Industri Pengolahan	245,9	13346,48	10,874,89	211.750,03	0,36
Pengadaan Listrik dan Gas	11,35	13346,48	238,19	211.750,03	0,76
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulangt	2,61	13346,48	94,71	211.750,03	0,44
Konstruksi	1098,3	13346,48	19,053,28	211.750,03	0,91
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1600,24	13346,48	29,361,36	211.750,03	0,86
Transportasi dan Pergudangan	463,65	13346,48	11,497,64	211.750,03	0,64
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	136,41	13346,48	3,574,51	211.750,03	0,61
Informasi dan Komunikasi	274,69	13346,48	6,202,61	211.750,03	0,70
Jasa Keuangan dan Asuransi	193,05	13346,48	3,622,21	211.750,03	0,85
<i>Real Estate</i>	278,71	13346,48	8,131,68	211.750,03	0,54
Jasa Perusahaan	39,8	13346,48	1,342,92	211.750,03	0,47
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	831,91	13346,48	18,754,54	211.750,03	0,70
Jasa Pendidikan	213,69	13346,48	5,776,94	211.750,03	0,59
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	316,13	13346,48	6,801,17	211.750,03	0,74
Jasa lainnya	57,5	13346,48	2,949,08	211.750,03	0,31

Lampiran 8

Perhitungan *National Share*, *Proportional share* dan *Differential*

Sektor Ekonomi	National share	Proportional share	Differential shift	Total
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	834,998	287,176	342,962	1465,136
Pertambangan dan Penggalian	320,635	551,840	1670,220	2542,695
Industri Pengolahan	52,991	18,004	47,670	118,666
Pengadaan Listrik dan Gas	3,524	0,482	0,164	4,170
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulangt	0,752	0,301	-0,329	0,724
Konstruksi	306,044	92,727	-15,128	383,643
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	438,870	83,427	141,910	664,206
Transportasi dan Pergudangan	142,815	16,191	19,683	178,688
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	34,443	14,751	-0,948	48,247
Informasi dan Komunikasi	70,838	28,658	-3,116	96,379
Jasa Keuangan dan Asuransi	59,882	10,820	-4,360	66,342
<i>Real Estate</i>	81,195	19,852	-3,430	97,618
Jasa Perusahaan	11,203	4,016	-2,694	12,525
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	253,289	48,032	-9,423	291,898
Jasa Pendidikan	57,948	21,547	-8,272	71,223
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	70,376	46,294	-9,631	107,040
Jasa lainnya	15,243	5,520	-0,473	20,290
PDRB	2755,045	1249,637	2164,806	6169,488

shift